



Perjanjian Kinerja Tahun 2019

**Kementerian Sekretariat Negara
2019**

KATA PENGANTAR

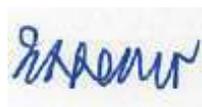
Dengan memanjatkan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Kementerian Sekretariat Negara telah dapat menyelesaikan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Dokumen ini merupakan penugasan dari pimpinan organisasi yang lebih tinggi kepada pimpinan organisasi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan sasaran dan indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 merupakan pelaksanaan tahun kelima Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-2019 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-2019.

Perjanjian Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2019 disusun secara berjenjang, mulai dari Menteri, pejabat Eselon I, Eselon II, Eselon III, Eselon IV, sampai dengan pejabat pelaksana dan pejabat fungsional sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Dengan adanya Perjanjian Kinerja ini, seluruh pejabat dan pegawai Kementerian Sekretariat Negara diharapkan dapat lebih bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara terencana, efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Jakarta, Januari 2019
Menteri Sekretaris Negara,



Pratikno

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Umum	1
B. Profil Kementerian Sekretariat Negara	2
1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	2
2. Susunan Organisasi	4
BAB II PERJANJIAN KINERJA	8
BAB III PENUTUP	12
LAMPIRAN	
I. Struktur Organisasi Kementerian Sekretariat Negara.....	
II. Perjanjian Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2019.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

Dalam rangka pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-2019 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-2019, Kementerian Sekretariat Negara telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Perjanjian Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2019 disusun dengan berpedoman pada:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara; dan
4. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2015-2019.

B. Profil Kementerian Sekretariat Negara

1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Sekretariat Negara berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dan dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara. Kementerian Sekretariat Negara mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Sekretariat Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan, keprotokolan, pers, dan media kepada Presiden;
- b. dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan dan keprotokolan, serta analisis kebijakan kepada Wakil Presiden dalam membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara;
- c. dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perwira Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, penganugerahan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan, yang wewenang penetapannya berada pada Presiden, serta koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan negara asing;

- d. dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian Rancangan Peraturan Perundang-undangan, penyiapan pendapat hukum, penyelesaian Rancangan Keputusan Presiden mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi, serta permintaan persetujuan kepada Sekretaris Kabinet atas permohonan izin prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan;
- e. dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyelenggaraan hubungan dengan lembaga negara, lembaga non struktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan penyelenggaraan hubungan masyarakat, serta penanganan pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri;
- f. dukungan teknis dan administrasi serta analisis dalam pengangkatan, pemberhentian, dan pensiun pejabat negara, pejabat pemerintahan, pejabat lainnya, dan Aparatur Sipil Negara yang wewenang penetapannya berada pada Presiden;
- g. pembinaan, penataan dan pengembangan Aparatur Sipil Negara, organisasi, tata laksana, dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;
- h. pembinaan dan pemberian dukungan teknis dan administrasi di bidang perencanaan, keuangan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, penyediaan prasarana dan sarana, serta pengembangan pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, serta pemberian dukungan prasarana dan sarana untuk pejabat negara tertentu, dan dukungan administrasi kepada Dokter Kepresidenan;

- i. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sekretariat Negara;
- j. penyelenggaraan koordinasi kerja sama teknik antara Pemerintah Indonesia dengan Mitra Pembangunan, dan penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri;
- k. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara; dan;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan Wakil Presiden serta oleh peraturan perundang-undangan.

2. Susunan Organisasi

Kementerian Sekretariat Negara terdiri atas:

1. Sekretariat Kementerian;
2. Sekretariat Presiden;
3. Sekretariat Wakil Presiden;
4. Sekretariat Militer Presiden;
5. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan;
6. Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan;
7. Deputi Bidang Administrasi Aparatur;
8. Staf Ahli Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan;
9. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Maritim, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
10. Staf Ahli Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pemerintahan;
11. Staf Ahli Bidang Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
12. Staf Ahli Bidang Komunikasi Politik dan Kehumasan.

Tugas masing-masing unsur organisasi Kementerian Sekretariat Negara tersebut adalah sebagai berikut.

1. Sekretariat Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan teknis

dan administrasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, serta pemberian dukungan prasarana dan sarana untuk pejabat negara tertentu, dukungan administrasi kepada Dokter Kepresidenan, dan koordinasi kerja sama teknik antara Pemerintah Indonesia dengan Mitra Pembangunan dan penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri.

2. Sekretariat Presiden mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan, keprotokolan, pers dan media kepada Presiden.
3. Sekretariat Wakil Presiden mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan dan keprotokolan, serta analisis kebijakan kepada Wakil Presiden dalam membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara.
4. Sekretariat Militer Presiden mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perwira Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), penganugerahan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan yang wewenangnya berada pada Presiden, serta koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan negara asing.
5. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian Rancangan Peraturan Perundang-undangan, penyiapan pendapat hukum, penyelesaian Rancangan Keputusan Presiden mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan dari pidana

penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi, serta permintaan persetujuan kepada Sekretaris Kabinet atas permohonan izin prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

6. Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyelenggaraan hubungan dengan lembaga negara, lembaga non struktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan penyelenggaraan hubungan masyarakat, serta penanganan pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri.
7. Deputi Bidang Administrasi Aparatur mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan teknis dan administrasi serta analisis dalam pengangkatan, pemberhentian, dan pensiun pejabat negara, pejabat pemerintahan, pejabat lainnya, dan Aparatur Sipil Negara yang wewenang penetapannya berada pada Presiden, serta pembinaan, penataan dan pengembangan Aparatur Sipil Negara, organisasi, tata laksana, dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.
8. Staf Ahli Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan mempunyai tugas memberikan telaahan dan rekomendasi terhadap isu mengenai politik, pertahanan, dan keamanan kepada Menteri.
9. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Maritim, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas memberikan telaahan dan rekomendasi terhadap isu mengenai ekonomi, maritim, pembangunan manusia dan kebudayaan kepada Menteri.

10. Staf Ahli Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pemerintahan mempunyai tugas memberikan telaahan dan rekomendasi terhadap isu mengenai hukum, hak asasi manusia, dan pemerintahan kepada Menteri.
11. Staf Ahli Bidang Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas memberikan telaahan dan rekomendasi terhadap isu mengenai aparatur negara dan reformasi birokrasi kepada Menteri.
12. Staf Ahli Bidang Komunikasi Politik dan Kehumasan mempunyai tugas memberikan telaahan dan rekomendasi terhadap isu mengenai komunikasi politik dan kehumasan kepada Menteri.

Bagan struktur organisasi Kementerian Sekretariat Negara disajikan pada Lampiran I.

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2019 disusun secara berjenjang, mulai dari Menteri, pejabat Eselon I, Eselon II, Eselon III, Eselon IV, sampai dengan pejabat pelaksana dan pejabat fungsional sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Tujuan disusunnya dokumen Perjanjian Kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan
5. sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2019 merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan organisasi yang lebih tinggi kepada pimpinan organisasi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Kementerian Sekretariat Negara sebagai berikut:

TABEL 1
SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2019
1. Meningkatnya dukungan teknis, administrasi dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dalam pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden	1. Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	100%
	2. Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disetujui oleh Presiden	100%
	3. Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	100%
	4. Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti Presiden	100%
	5. Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disetujui oleh Presiden	100%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2019
	6. Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden	100%
	7. Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	45%
	8. Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara	3,00
2. Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden	1. Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,69
	2. Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,69
	3. Persentase pelaksanaan kegiatan VVIP yang aman	100%

Untuk mendukung capaian kinerja sasaran strategis tersebut di atas, disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2019 mulai dari Menteri, pejabat Eselon I, Eselon II, Eselon III, Eselon IV sampai dengan pejabat pelaksana dan pejabat fungsional.

Perjanjian Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2019 yang telah ditandatangani secara berjenjang terdapat dalam Lampiran II.

BAB III

PENUTUP

Dengan telah tersusunnya dokumen Perjanjian Kinerja Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2019, diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh satuan organisasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, untuk:

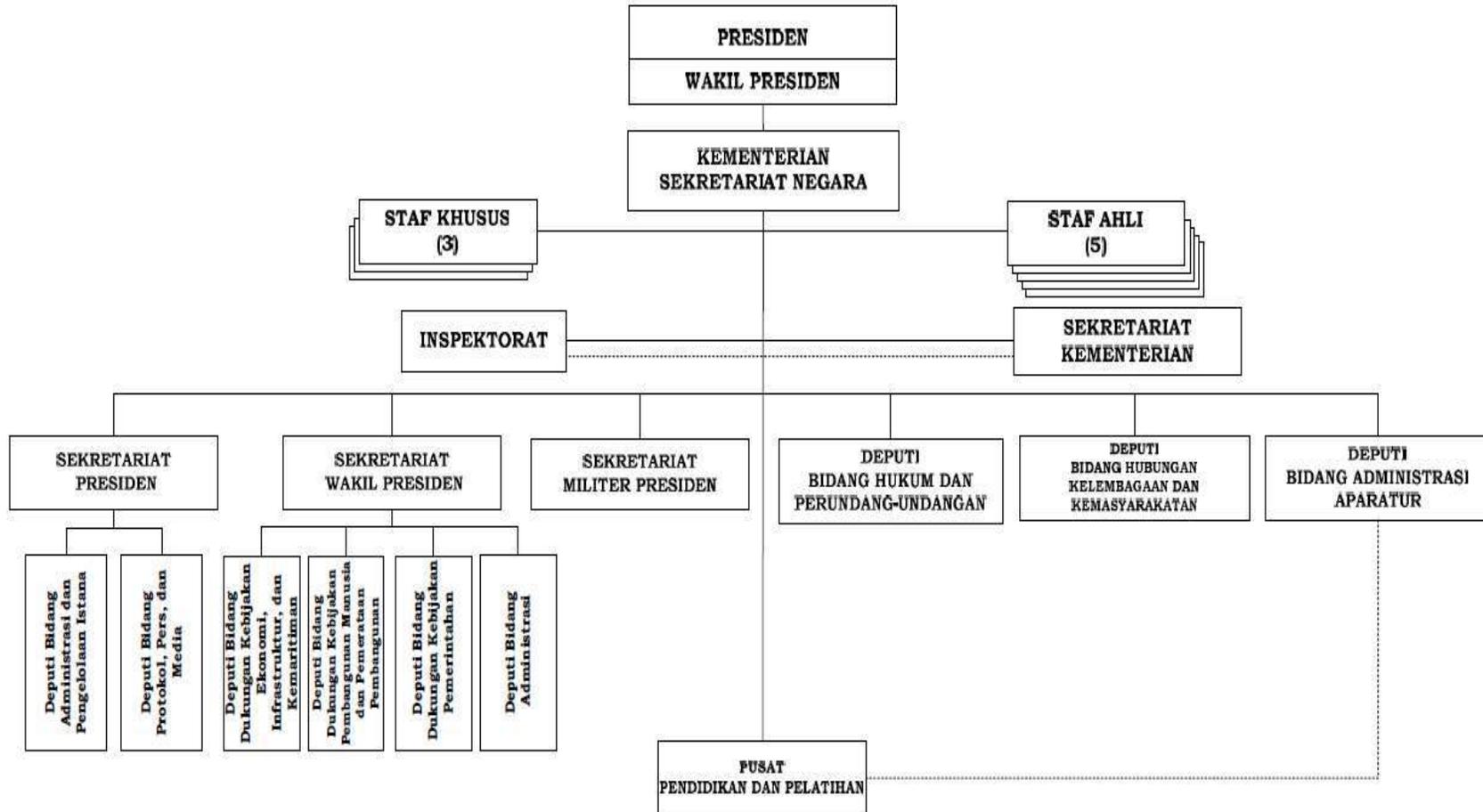
- a. menyusun rencana aksi atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja;
- b. menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- c. memantau dan mengendalikan capaian kinerja organisasi;
- d. menyusun Laporan Kinerja; dan
- e. menyusun Sasaran Kerja Pegawai.

Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ini agar dilaksanakan dengan sungguh-sungguh serta dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh jajaran Kementerian Sekretariat Negara, sehingga kinerja Kementerian Sekretariat Negara dapat lebih meningkat.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I
STRUKTUR ORGANISASI
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA



LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
TAHUN 2019



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Pratikno
jabatan : Menteri Sekretaris Negara

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Jakarta, Januari 2019
Menteri Sekretaris Negara,

Pratikno

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya dukungan teknis, administrasi, dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dalam pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden	1. Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	100%
		2. Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang disetujui oleh Presiden	100%
		3. Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan yang disetujui oleh Presiden	100%
		4. Persentase dukungan hubungan kelembagaan dan masyarakat yang ditindaklanjuti Presiden	100%
		5. Persentase pelayanan administrasi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, TNI, dan Polri yang disetujui oleh Presiden	100%
		6. Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden	100%
		7. Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditindaklanjuti	45%
		8. Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara	3,00
2	Terjaminnya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden	1. Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,69
		2. Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden dan Wakil Presiden	4,69
		3. Persentase pelaksanaan kegiatan VVIP yang aman	100%

Program

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden | Rp33.896.689.000,00 |
| 2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara | Rp365.349.348.000,00 |

Jakarta, Januari 2019
Menteri Sekretaris Negara,



Pratikno

SEKRETARIAT KEMENTERIAN



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Setya Utama
jabatan : Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama : Pratikno
jabatan : Menteri Sekretaris Negara

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Pratikno

Jakarta, Januari 2019
Pihak Pertama,

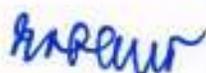
Setya Utama

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SEKRETARIS KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada Menteri Sekretaris Negara di bidang perencanaan, keuangan, dan ketatausahaan	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang disetujui instansi terkait	100%
		Rata-rata indeks kepuasan pengguna layanan administrasi keuangan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	3,00
		Kualitas opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara	WTP
		Rata-rata indeks kepuasan pengguna layanan penatausahaan naskah dinas, dokumen/arsip di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	3,00
2.	Tersedianya layanan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang berkualitas	Indeks kepuasan layanan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	3,00
3.	Tersedianya layanan penyediaan sarana dan prasarana Kementerian Sekretariat Negara dan pejabat negara yang berkualitas	Indeks kepuasan layanan penyediaan sarana dan prasarana Kementerian Sekretariat Negara	3,00
		Indeks kepuasan layanan penyediaan sarana dan prasarana Pejabat Negara tertentu	3,00
4	Meningkatnya efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kualitas pelayanan administrasi perjalanan dinas luar negeri	Indeks efektivitas koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan kemanfaatan perjalanan dinas luar negeri yang diadministrasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara	3,00

Program	Anggaran
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara	Rp 465.780.125.000
2. Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden	Rp 8.995.954.000

Menteri Sekretaris Negara,



Pratikno

Jakarta, Januari 2019
Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara,



Setya Utama



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Hindun Sridadi
jabatan : Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama : Setya Utama
jabatan : Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Setya Utama

Jakarta, Januari 2019
Pihak Pertama,

Hindun Sridadi

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA BIRO PERENCANAAN**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, dokumen pelaporan dan evaluasi kegiatan serta dokumen lainnya terkait perencanaan dan penganggaran Kementerian Sekretariat Negara yang berkualitas	Persentase dokumen perencanaan yang disusun dengan kategori "Baik"	100%
		Persentase satuan kerja yang menerapkan penganggaran berbasis kinerja	100%
		Persentase dokumen pelaporan dan evaluasi kegiatan yang disusun sesuai dengan standar	100%

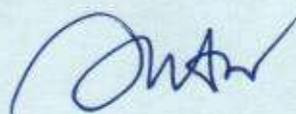
Kegiatan

Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran

Anggaran

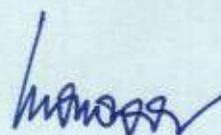
Rp 774.950.000

Sekretaris Kementerian
Sekretariat Negara,



Setya Utama

Jakarta, Januari 2019
Kepala Biro Perencanaan,



Hindun Sridadi



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Eka Denny Mansjur
jabatan : Kepala Biro Keuangan, Sekretariat Kementerian

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

nama : Setya Utama
jabatan : Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Setya Utama

Eka Denny Mansjur

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
ESELON II**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang transparan dan akuntabel	Persentase pelayanan pelaksanaan anggaran sesuai dengan standar Persentase tingkat keandalan Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan	100% 100%

Kegiatan:
Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

Anggaran:
Rp845.760.000,00

Sekretaris Kementerian
Sekretariat Negara,



Setya Utama

Jakarta, Januari 2019
Kepala Biro Keuangan,
Sekretariat Kementerian,



Eka Denny Mansjur



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Sari Harjanti
jabatan : Kepala Biro Tata Usaha

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama : Setya Utama
jabatan : Sekretaris Kementerian

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Setya Utama

Jakarta, Januari 2019

Pihak Pertama,

Sari Harjanti

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BIRO TATA USAHA**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terselenggaranya urusan ketatausahaan, pengelolaan bahan kebijakan, kepustakaan, arsip dan dokumentasi, dan keprotokolan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	1 Indeks kepuasan pengguna layanan penatausahaan dan pengamanan naskah dinas dan dokumen kenegaraan di lingkungan Kemensetneg.	3 dalam skala 4
		2 Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan dan pengamanan arsip di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.	3 dalam skala 4
		3 Indeks kepuasan pengguna layanan perpustakaan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.	3 dalam skala 4
		4 Persentase pelayanan acara dan keprotokolan kepada Mensesneg sesuai dengan jadwal.	100%
		5 Persentase hasil analisis kebijakan kepada Menteri Sekretaris Negara yang diselesaikan tepat waktu.	100%

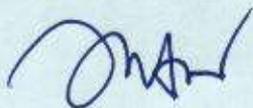
Kegiatan

Anggaran

Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, pengelolaan bahan kebijakan, kepustakaan, arsip dan dokumentasi, dan keprotokolan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara

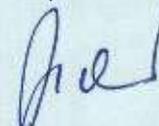
Rp3.686.430.000,00

Sekretaris Kementerian,



Setya Utama

Jakarta, Januari 2019
Kepala Biro Tata Usaha,



Sarl Harjanti



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

nama : ANDRIE SYAHRIZA
jabatan : KEPALA BIRO INFORMASI DAN TEKNOLOGI

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama : SETYA UTAMA
jabatan : SEKRETARIS KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

SETYA UTAMA

Jakarta, 21 Januari 2019
Pihak Pertama,

ANDRIE SYAHRIZA

PERJANJIAN KINERJA 2019
BIRO INFORMASI DAN TEKNOLOGI

No (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Terselenggaranya layanan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi secara andal dan aman	1. Indeks kepuasan pengunjung website Kementerian Sekretariat Negara	2,75
		2. Indeks pembuatan/ pengembangan aplikasi sistem informasi	2,75
		3. Indeks kepuasan layanan sosialisasi dan bimbingan teknis aplikasi sistem informasi	2,75
		4. Indeks ketersediaan layanan infrastruktur komunikasi data dan informasi	2,75

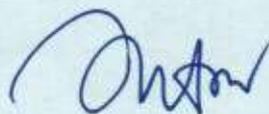
Kegiatan

Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara

Anggaran

Rp. 19.931.565.000,-

Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara



Setya Utama

Jakarta, 21 Januari 2019

Kepala Biro Informasi dan Teknologi



Andrie Syahriza



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Nanik Purwanti
jabatan : Kepala Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama : Setya Utama
jabatan : Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

(Setya Utama)

Jakarta, Januari 2019

Pihak Pertama,

(Nanik Purwanti)

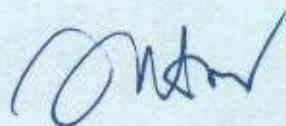
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

ESELON II

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya koordinasi kerja sama teknik luar negeri dan pelayanan administrasi perjalanan dinas luar negeri yang cepat dan tepat	1. Persentase dokumen perjalanan dinas luar negeri yang diselesaikan sesuai standar	100%
		2. Persentase dokumen kerja sama teknik meliputi proyek, tenaga ahli, dan beasiswa yang diselesaikan sesuai standar	100%
		3. Persentase dokumen rekomendasi fasilitas kerja sama teknik meliputi keimigrasian, perpajakan, kepabeanan, dan kendaraan yang diselesaikan sesuai standar	100%
		4. Persentase pelaksanaan Program Kerja Sama Teknik Selatan-Selatan (KTSS) Indonesia	100%

- | | |
|---|--------------------|
| Kegiatan | Anggaran |
| 1. Penyelenggaraan Koordinasi Kerja Sama Teknik Luar Negeri | Rp 3.796.115.000,- |

Pihak Kedua,



Setya Utama

Jakarta, Januari 2019
Pihak Pertama,



Nanik Purwanti



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Piping Supriatna

jabatan : Kepala Biro Umum, Sekretariat Kementerian

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

nama : Setya Utama

jabatan : Sekretariat Kementerian

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

(Setya Utama)

(Piping Supriatna)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

ESELON II

No. (1)	Sasaran Program / Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Tersedianya sarana dan prasarana kantor, rumah jabatan pejabat Negara, wisma, serta pelayanan umum lainnya yang berkualitas.	1. Indeks kepuasan layanan penyediaan sarana dan prasarana Kementerian Sekretariat Negara;	3.00
		2. Indeks kepuasan layanan penyediaan sarana dan prasarana Pejabat Negara tertentu;	3.00
		3. Persentase laporan pengelolaan BMN milik Kementerian Sekretariat Negara sesuai dengan ketentuan.	100%

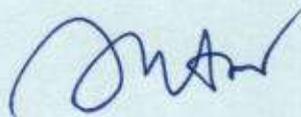
Kegiatan:

Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum Lainnya Kementerian Sekretariat Negara

Anggaran:

Rp440.712.310.000,00

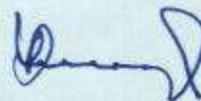
Sekretaris Kementerian,



(Setya Utama)

Jakarta, Januari 2019

Kepala Biro Umum,



(Piping Supriatna)

SEKRETARIAT PRESIDEN



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT PRESIDEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Heru Budi Hartono
jabatan : Kepala Sekretariat Presiden

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama : Pratikno
jabatan : Menteri Sekretaris Negara

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Pratikno

Jakarta, Desember 2018
Pihak Pertama,

Heru Budi Hartono

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT PRESIDEN**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Indikator Kinerja Utama:	
1.	Terjaminnya pemberian layanan kerumahtangaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada Presiden	1. Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtangaan kepada Presiden	4,95 dalam skala 6
		Indikator Kinerja Kegiatan:	
		1. Indeks kepuasan pengguna layanan dukungan administrasi dan kerumahtangaan Istana-istana Kepresidenan di Daerah	4,95 dalam skala 6
		2. Indeks kepuasan pengguna layanan perencanaan, keuangan, ketatausahaan dan kepegawaian	4,95 dalam skala 6
		3. Indeks kepuasan pengguna layanan sarana dan prasarana serta dukungan umum lainnya	4,95 dalam skala 6
		4. Indeks kepuasan pengguna layanan dukungan jamuan, seni budaya dan tata graha, peralatan dan penataan lingkungan, serta kerumahtangaan lainnya	4,95 dalam skala 6
		Indikator Kinerja Utama:	
		2. Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden	4,95 dalam skala 6
		Indikator Kinerja Kegiatan:	
		1. Indeks kepuasan pengguna layanan dukungan keprotokolan untuk kegiatan kenegaraan/resmi, Tamu Negara dan kegiatan penting lainnya	4,95 dalam skala 6
	2. Indeks kepuasan pengguna layanan dukungan pers, media, dan informasi	4,95 dalam skala 6	

Kegiatan

1. Penyelenggaraan Tugas Teknis dan Administrasi Kerumahtangaan, Keprotokolan, Pers, dan Media kepada Presiden

Anggaran

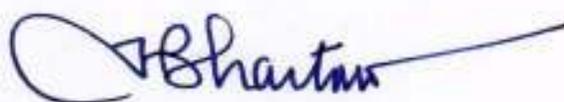
Rp256.906.262.000,00

Menteri Sekretaris Negara,

Jakarta, Desember 2018
Kepala Sekretariat Presiden,



Pratikno



Heru Budi Hartono



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT PRESIDEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Rika Kiswardani
jabatan : Deputy Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama : Heru Budi Hartono
jabatan : Kepala Sekretariat Presiden

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Heru Budi Hartono

Jakarta, Desember 2018
Pihak Pertama,

Rika Kiswardani

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN ISTANA

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kelancaran aktivitas Presiden melalui dukungan kerumahtanggaan	Indikator Kinerja Utama	
		1. Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Presiden	4,95 dalam skala 6
		Indikator Kinerja Lainnya:	
		1. Indeks kepuasan pengguna layanan dukungan administrasi dan kerumahtanggaan Istana-istana Kepresidenan di Daerah	4,95 dalam skala 6
		2. Indeks kepuasan pengguna layanan perencanaan, keuangan, ketatausahaan dan kepegawaian	4,95 dalam skala 6
		3. Indeks kepuasan pengguna layanan sarana dan prasarana serta dukungan umum lainnya	4,95 dalam skala 6
		4. Indeks kepuasan pengguna layanan dukungan jamuan, seni budaya dan tata graha, peralatan dan penataan lingkungan, serta kerumahtanggaan lainnya	4,95 dalam skala 6
		5. Persentase pengelolaan dana operasional Presiden dan bantuan kemasyarakatan	100%

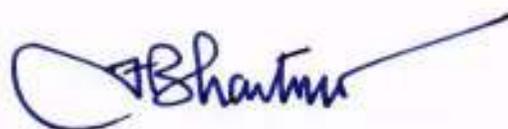
Kegiatan

1. Penyelenggaraan Tugas Teknis dan Administrasi Kerumahtanggaan, Keprotokolan, Pers, dan Media kepada Presiden

Anggaran

Rp212.864.023.000,00

Kepala Sekretariat Presiden,



Heru Budi Hartono

Jakarta, Desember 2018
 Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana,



Rika Kiswardani



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT PRESIDEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : U c u
jabatan : Kepala Biro Administrasi

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama : Rika Kiswardani
jabatan : Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


Rika Kiswardani

Jakarta, Desember 2018
Pihak Pertama,


U c u

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BIRO ADMINISTRASI**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya dukungan administrasi kesekretariatan yang berkualitas	Indikator Kinerja Utama:	
		1. Indeks kepuasan pengguna layanan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, dan kepegawaian	4,95 dalam skala 6
		Indikator Kinerja Lainnya:	
		1. Persentase peningkatan dan pemantauan kinerja organisasi yang diselenggarakan di lingkungan Sekretariat Presiden	100%
		2. Jumlah dokumen evaluasi dan laporan yang disusun di lingkungan Sekretariat Presiden	7 dokumen
		3. Jumlah dokumen penyusunan rencana kerja dan laporan Biro	2 dokumen

Kegiatan

1. Penyelenggaraan Tugas Teknis dan Administrasi Kerumahtanggaan, Keprotokolan, Pers, dan Media kepada Presiden

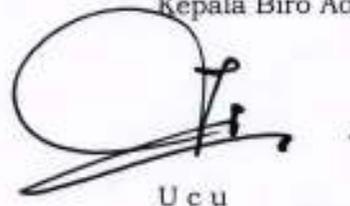
Anggaran

Rp104.033.219.000,00

Deputi Bidang Administrasi dan
Pengelolaan Istana,


Rika Kiswardani

Jakarta, Desember 2018
Kepala Biro Administrasi,


U c u



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT PRESIDEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Yudhi Wijayanto
jabatan : Kepala Biro Umum

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama : Rika Kiswardani
jabatan : Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


Rika Kiswardani

Jakarta, Desember 2018
Pihak Pertama,


Yudhi Wijayanto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BIRO UMUM**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya dukungan penyediaan sarana dan prasarana serta dukungan umum lainnya yang berkualitas	Indikator Kinerja Utama:	
		1. Indeks kepuasan pengguna layanan sarana dan prasarana serta dukungan umum lainnya	4,95 dalam skala 6
		Indikator Kinerja Lainnya:	
		1. Indeks kelancaran pemberian dukungan layanan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan VVIP	4,95 dalam skala 6
		2. Jumlah dokumen penyusunan rencana kerja dan laporan Biro	2 dokumen

Kegiatan

1. Penyelenggaraan Tugas Teknis dan Administrasi Kerumahtanggaan, Keprotokolan, Pers, dan Media kepada Presiden

Anggaran

Rp56.642.526.000,00

Deputi Bidang Administrasi dan
Pengelolaan Istana,

Jakarta, Desember 2018
Kepala Biro Umum,


Rika Kiswardana


Yudhi Wijayanto



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT PRESIDEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : MF. Darmastuti N.
jabatan : Kepala Biro Pengelolaan Istana

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

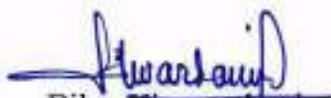
nama : Rika Kiswardani
jabatan : Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

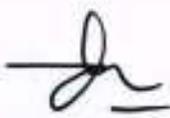
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


Rika Kiswardani

Jakarta, Desember 2018
Pihak Pertama,


MF. Darmastuti N

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BIRO PENGELOLAAN ISTANA**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya dukungan jamuan, seni budaya dan tata graha, peralatan dan penataan lingkungan, serta kerumahtanggaan lainnya yang berkualitas	Indikator Kinerja Utama:	
		1. Indeks kepuasan pengguna layanan dukungan jamuan, seni budaya dan tata graha, peralatan dan penataan lingkungan, serta kerumahtanggaan lainnya	4,95 dalam skala 6
		Indikator Kinerja Lainnya:	
		1. Indeks kelancaran dukungan jamuan, seni budaya dan tata graha, peralatan dan penataan lingkungan.	4,95 dalam skala 6
		2. Jumlah dokumen pengelolaan dana operasional dan bantuan Presiden	2 dokumen
		3. Jumlah dokumen pengelolaan dana bantuan masyarakat	2 dokumen
		4. Jumlah dokumen penyusunan rencana kerja dan laporan Biro	2 dokumen

Kegiatan

1. Penyelenggaraan Tugas Teknis dan Administrasi Kerumahtanggaan, Keprotokolan, Pers, dan Media kepada Presiden

Anggaran

Rp52.188.278.000,00

Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana,


Rika Kiswardani

Jakarta, Desember 2018
Kepala Biro Pengelolaan Istana,


MF. Darmastuti Nugroho



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT PRESIDEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Bey Triadi Machmudin
jabatan : Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama : Heru Budi Hartono
jabatan : Kepala Sekretariat Presiden

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Heru Budi Hartono

Jakarta, Desember 2018
Pihak Pertama,

Bey Triadi Machmudin

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DEPUTI BIDANG PROTOKOL, PERS, DAN MEDIA**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kelancaran tugas-tugas Presiden melalui dukungan keprotokolan	Indikator Kinerja Utama: 1. Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden	4,95 dalam skala 6
		Indikator Kinerja Lainnya: 1. Indeks kepuasan pengguna layanan dukungan keprotokolan untuk kegiatan kenegaraan/resmi, Tamu Negara, dan kegiatan penting lainnya	4,95 dalam skala 6
		2. Indeks kepuasan pengguna layanan dukungan pers, media, dan informasi	4,95 dalam skala 6
		3. Persentase pendokumentasian kegiatan Presiden dan/atau Isteri/Suami Presiden, Tamu Negara, dan kegiatan penting lainnya yang diselenggarakan di lingkungan Sekretariat Presiden	100%
		4. Persentase pengelolaan Perpustakaan Kepresidenan yang diselenggarakan di lingkungan Sekretariat Presiden	100%

Kegiatan

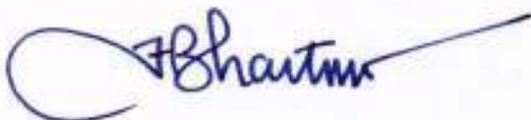
1. Penyelenggaraan Tugas Teknis dan Administrasi Kerumahtanggaan, Keprotokolan, Pers, dan Media kepada Presiden

Anggaran

Rp 44.042.239.000

Kepala Sekretariat Presiden,

Jakarta, Desember 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media,



Heru Budi Hartono



Bey Triadi Machmudin



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT PRESIDEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Yayat Hidayat
jabatan : Kepala Biro Protokol

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama : Bey Triadi Machmudin
jabatan : Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Bey Triadi Machmudin

Jakarta, Desember 2018
Pihak Pertama,

Yayat Hidayat

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BIRO PROTOKOL**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya dukungan keprotokolan yang berkualitas	Indikator Kinerja Utama: 1. Indeks kepuasan pengguna layanan dukungan keprotokolan untuk kegiatan kenegaraan/resmi, Tamu Negara dan kegiatan penting lainnya	4,95 dalam skala 6
		Indikator Kinerja Lainnya: 1. Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Presiden	4,95 dalam skala 6
		2. Jumlah dokumen penyusunan rencana kerja dan laporan Biro	2 dokumen

Kegiatan

1. Penyelenggaraan Tugas Teknis dan Administrasi Kerumahtanggaan, Keprotokolan, Pers, dan Media kepada Presiden

Anggaran

Rp 40.260.863.000

Deputi Bidang Protokol, Pers,
dan Media,



Bey Triadi Machmudin

Jakarta, Desember 2018
Kepala Biro Protokol,



Yayat Hidayat



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT PRESIDEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Sinta Puspitasari
jabatan : Plt. Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama : Bey Triadi Machmudin
jabatan : Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Bey Triadi Machmudin

Jakarta, Desember 2018

Pihak Pertama,

Sinta Puspitasari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BIRO PERS, MEDIA DAN INFORMASI**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya dukungan pers, media dan informasi yang berkualitas	Indikator Kinerja Utama: 1. Indeks kepuasan pengguna layanan dukungan pers, media, dan informasi	4,95 dalam skala 6
		Indikator Kinerja Lainnya: 1. Indeks kepuasan pemberian dukungan layanan aplikasi dan jaringan	4,95 dalam skala 6
		2. Persentase pengelolaan Perpustakaan Kepresidenan yang diselenggarakan di lingkungan Sekretariat Presiden	100%
		3. Jumlah dokumen rencana kerja dan laporan Biro	2 dokumen

Kegiatan

1. Penyelenggaraan Tugas Teknis dan Administrasi Kerumahtanggaan, Keprotokolan, Pers, dan Media kepada Presiden

Anggaran

Rp3.781.376.000,00

Deputi Bidang Protokol, Pers,
dan Media,



Bey Triadi Machmudin

Jakarta, Desember 2018

Plt. Kepala Biro Pers, Media dan Informasi,



Sinta Puspitasari



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT PRESIDEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Erwin Wicaksono
jabatan : Kepala Istana Kepresidenan Bogor

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama : Heru Budi Hartono
jabatan : Kepala Sekretariat Presiden

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Heru Budi Hartono

Jakarta, Desember 2018
Pihak Pertama,

Erwin Wicaksono

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
ISTANA KEPRESIDENAN BOGOR**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya dukungan administrasi dan kerumahtanggaan Istana Kepresidenan Bogor yang berkualitas	Indikator Kinerja Utama: 1. Indeks kepuasan pengguna layanan dukungan administrasi dan kerumahtanggaan Istana Kepresidenan Bogor	4,95 dalam skala 6
		Indikator Kinerja Lainnya:	
		1. Persentase pelaksanaan tata usaha di Istana Kepresidenan Bogor	100%
		2. Persentase dukungan kerumahtanggaan dan keprotokolan di Istana Kepresidenan Bogor	100%
		3. Persentase pengelolaan sarana dan prasarana Istana Kepresidenan Bogor	100%
		4. Persentase penatausahaan BMN di lingkungan Istana Kepresidenan Bogor	100%

Kegiatan

1. Penyelenggaraan Tugas Teknis dan Administrasi Kerumahtanggaan, Keprotokolan, Pers, dan Media kepada Presiden

Anggaran

Rp34.843.547.000,00

Kepala Sekretariat Presiden,



Heru Budi Hartono

Jakarta, Desember 2018
Kepala Istana Kepresidenan Bogor,



Erwin Wicaksono



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT PRESIDEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Saipullah
jabatan : Kepala Istana Kepresidenan Yogyakarta

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama : Heru Budi Hartono
jabatan : Kepala Sekretariat Presiden

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Heru Budi Hartono

Jakarta, Desember 2018
Pihak Pertama,

Saipullah

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
ISTANA KEPRESIDENAN YOGYAKARTA**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya dukungan administrasi dan kerumahtanggaan Istana Kepresidenan Yogyakarta yang berkualitas	Indikator Kinerja Utama:	
		1. Indeks kepuasan pengguna layanan dukungan administrasi dan kerumahtanggaan Istana Kepresidenan Yogyakarta	4,95 dalam skala 6
		Indikator Kinerja Lainnya:	
		1. Persentase pelaksanaan tata usaha di Istana Kepresidenan Yogyakarta	100%
		2. Persentase dukungan kerumahtanggaan dan keprotokolan di Istana Kepresidenan Yogyakarta	100%
		3. Persentase pengelolaan sarana dan prasarana Istana Kepresidenan Yogyakarta	100%
		4. Persentase penatausahaan BMN di lingkungan Istana Kepresidenan Yogyakarta	100%

Kegiatan

1. Penyelenggaraan Tugas Teknis dan Administrasi Kerumahtanggaan, Keprotokolan, Pers, dan Media kepada Presiden

Anggaran

Rp26.378.773.000,00

Kepala Sekretariat Presiden,



Heru Budi Hartono

Jakarta, Desember 2018
Kepala Istana Kepresidenan Yogyakarta,



Saipullah



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT PRESIDEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : U c u
jabatan : Plt. Kepala Istana Kepresidenan Cipanas

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama : Heru Budi Hartono
jabatan : Kepala Sekretariat Presiden

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Jakarta, Desember 2018
Pihak Pertama,

Heru Budi Hartono

U c u

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
ISTANA KEPRESIDENAN CIPANAS**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya dukungan administrasi dan kerumahtanggaan Istana Kepresidenan Cipanas yang berkualitas	Indikator Kinerja Utama: 1. Indeks kepuasan pengguna layanan dukungan administrasi dan kerumahtanggaan Istana Kepresidenan Cipanas	4,95 dalam skala 6
		Indikator Kinerja Lainnya:	
		1. Persentase pelaksanaan tata usaha di Istana Kepresidenan Cipanas	100%
		2. Persentase dukungan kerumahtanggaan dan keprotokolan di Istana Kepresidenan Cipanas	100%
		3. Persentase pengelolaan sarana dan prasarana Istana Kepresidenan Cipanas	100%
		4. Persentase penatausahaan BMN di lingkungan Istana Kepresidenan Cipanas	100%

Kegiatan

1. Penyelenggaraan Tugas Teknis dan Administrasi Kerumahtanggaan, Keprotokolan, Pers, dan Media kepada Presiden

Anggaran

Rp21.740.595.000,00

Kepala Sekretariat Presiden,

Heru Budi Hartono

Jakarta, Desember 2018

Pt. Kepala Istana Kepresidenan Cipanas,

U c u



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT PRESIDEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : I Dewa Gde Swarthana
jabatan : Kepala Istana Kepresidenan Tampaksiring

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama : Heru Budi Hartono
jabatan : Kepala Sekretariat Presiden

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Heru Budi Hartono

Jakarta, Desember 2018
Pihak Pertama,

I Dewa Gde Swarthana

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
ISTANA KEPRESIDENAN TAMPAKSIRING**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya dukungan administrasi dan kerumahtanggaan Istana Kepresidenan Tampaksiring yang berkualitas	Indikator Kinerja Utama:	
		1. Indeks kepuasan pengguna layanan dukungan administrasi dan kerumahtanggaan Istana Kepresidenan Tampaksiring Bali	4,95 dalam skala 6
		Indikator Kinerja Lainnya:	
		1. Persentase pelaksanaan tata usaha di Istana Kepresidenan Tampaksiring Bali	100%
		2. Persentase dukungan kerumahtanggaan dan keprotokolan di Istana Kepresidenan Tampaksiring Bali	100%
		3. Persentase pengelolaan sarana dan prasarana Istana Kepresidenan Tampaksiring Bali	100%
		4. Persentase penatausahaan BMN di lingkungan Istana Kepresidenan Tampaksiring Bali	100%

Kegiatan

1. Penyelenggaraan Tugas Teknis dan Administrasi Kerumahtanggaan, Keprotokolan, Pers, dan Media kepada Presiden

Anggaran

Rp22.062.523.000,00

Kepala Sekretariat Presiden,



Heru Budi Hartono

Jakarta, Desember 2018
Kepala Istana Kepresidenan Tampaksiring,



I Dewa Gde Swarthana

SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN



**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohamad Oemar
Jabatan : Kepala Sekretariat Wakil Presiden

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : Pratikno
Jabatan : Menteri Sekretaris Negara

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Pratikno

Jakarta, Januari 2019
Pihak Pertama,

Mohamad Oemar

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya dukungan teknis, administrasi dan analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara dalam mendukung pelaksanaan tugas Wakil Presiden	1 Persentase analisis kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	100%
2	Terjaminya pemberian layanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang berkualitas kepada wakil presiden	2 Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden	4,44
		3 Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Wakil Presiden	4,44
		4 Persentase kegiatan pers, media, dan pelayanan informasi serta dokumentasi kegiatan Wakil Presiden dan acara lainnya di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang diselesaikan	100%
		5 Persentase kegiatan pelayanan administrasi umum di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang diselesaikan	100%
		6 Jumlah laporan pengelolaan dana operasional Wakil Presiden	1 laporan
		7 Jumlah laporan program, anggaran dan keuangan di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang disusun	2 dokumen

Kegiatan:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara
2. Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden

Anggaran:

Rp.104.646.971.000,00

Rp.2.581.434.000,00

Jakarta, Januari 2019

Menteri Sekretaris Negara,



Pratikno

Kepala Sekretariat Wakil Presiden,



Mohamad Oemar



**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Wilarno Setiawan
jabatan : Pjt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur, dan Kemaritiman

selanjutnya disebut pihak pertama,

nama : Mohamad Oemar
jabatan : Kepala Sekretariat Wakil Presiden

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,

Mohamad Oemar

Pihak Pertama,

Wilarno Setiawan

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DEPUTI BIDANG DUKUNGAN KEBIJAKAN EKONOMI, INFRASTRUKTUR, DAN
KEMARITIMAN**

No. (1)	Sasaran Program/Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)		Target (4)
1	Meningkatnya kualitas analisis kebijakan di bidang ekonomi, infrastruktur, dan kemaritiman kepada Wakil Presiden	1	Persentase hasil analisis kebijakan di bidang ekonomi, infrastruktur, dan kemaritiman yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	100%
		2	Jumlah dokumen rencana kerja dan laporan Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur, dan Kemaritiman	2 dokumen

Kegiatan:

Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden

Anggaran:

Rp973.562.000,-

Jakarta, Januari 2019

Kepala Sekretariat Wakil Presiden



Mohamad Oemar

Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur, dan Kemaritiman,



Wilarno Setiawan



**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Ahmad Lutfie
jabatan : Asisten Deputi Keuangan, Investasi, dan Badan Usaha

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama : Wilarno Setiawan
jabatan : Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur, dan Kemaritiman

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Wilarno Setiawan

Jakarta, Januari 2019
Pihak Pertama,

Ahmad Lutfie

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
ASISTEN DEPUTI KEUANGAN, INVESTASI, DAN BADAN USAHA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terlaksananya hasil analisis kebijakan di bidang keuangan, investasi, dan badan usaha	1	Persentase hasil analisis kebijakan di bidang keuangan, investasi, dan badan usaha yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur, dan Kemaritiman	100%
		2	Jumlah dokumen rencana kerja dan laporan Asisten Deputi Keuangan, Investasi, dan Badan Usaha	2 dokumen

Kegiatan:

Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Keuangan, Investasi, dan Badan Usaha

Anggaran:

Rp 228.285.000,-

Pit. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur, dan Kemaritiman,



Wilarno Setiawan

Jakarta, Januari 2019

Asisten Deputi Keuangan, Investasi, dan Badan Usaha,



Ahmad Lutfie



**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Wilarno Setiawan
jabatan : Asisten Deputi Infrastruktur, Energi, dan Tata Ruang

selanjutnya disebut pihak pertama,

nama : Wilarno Setiawan
jabatan : Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infratsruktur, dan Kemaritiman

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,

Wilarno Setiawan

Pihak Pertama,

Wilarno Setiawan

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
ASISTEN DEPUTI INFRASTRUKTUR, ENERGI DAN TATA RUANG**

No. (1)	Sasaran Program/Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Terlaksananya hasil analisis kebijakan di bidang infrastruktur, energi, dan tata ruang	1 Persentase laporan hasil analisis kebijakan di bidang infrastruktur, energi, dan tata ruang yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur, dan Kemaritiman. 2 Jumlah dokumen rencana kerja dan laporan Asisten Deputi Infrastruktur, Energi, dan Tata Ruang	100% 2 dokumen

Kegiatan:

Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden

Anggaran:

Rp268.075.000,-

Jakarta, Januari 2019

Pit. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur, dan Kemaritiman,

Asisten Deputi Infrastruktur, Energi dan Tata Ruang.



Wilarno Setiawan



Wilarno Setiawan



**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Setio Sapto Nugroho
jabatan : Asisten Deputi Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Hayati

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama : Wilarno Setiawan
jabatan : Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur, dan Kemaritiman

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Jakarta, Januari 2019

Wilarno Setiawan

Pihak Pertama,

Setio Sapto Nugroho



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
ASISTEN DEPUTI KETAHANAN PANGAN DAN SUMBER DAYA HAYATI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)		(4)
1	Terlaksananya hasil analisis kebijakan di bidang ketahanan pangan dan sumber daya hayati	Persentase laporan hasil analisis kebijakan di bidang ketahanan pangan dan sumber daya hayati yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur, dan Kemartiman Jumlah dokumen rencana kerja dan laporan Asisten Deputi	100% 2 dokumen

Kegiatan

Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden

Anggaran

Rp. 226.517.000,-

Jakarta, Januari 2019

Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur, dan Kemaritiman

Asisten Deputi Ketahanan Pangan dan Sumber Daya Hayati

Wilarno Setiawan

Setio Supto Nugroho



**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Muchammad Zulkarnain
jabatan : Asisten Deputi Industri, Perdagangan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif

selanjutnya disebut pihak pertama,

nama : Wilarno Setiawan
jabatan : Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastuktur, dan Kemaritiman

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,

Wilarno Setiawan

Pihak Pertama,

Muchammad Zulkarnain

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
ASISTEN DEPUTI INDUSTRI, PERDAGANGAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

No. (1)	Sasaran Program/Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Terlaksananya hasil analisis kebijakan di bidang industri, perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif	1. Persentase laporan hasil analisis kebijakan di bidang industri, perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur, dan Kemaritiman. 2. Jumlah dokumen rencana kerja dan laporan Asisten Deputi.	100% 2 dokumen

Kegiatan:

Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden

Anggaran:

Rp250.685.000,-

Jakarta, Januari 2019

Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur, dan Kemaritiman,

Asisten Deputi Industri, Perdagangan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif,



Wilarno Setiawan



Muchammad Zulkarnain



**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bambang Widiyanto
Jabatan : Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan
Pemerataan Pembangunan

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : Mohamad Oemar
Jabatan : Kepala Sekretariat Wakil Presiden

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Jakarta, Januari 2019

Pihak Pertama,

Mohamad Oemar

Bambang Widiyanto



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DEPUTI BIDANG DUKUNGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas analisis kebijakan di bidang pembangunan manusia dan pemerataan pembangunan kepada Wakil Presiden	1 Persentase hasil analisis kebijakan di bidang pembangunan manusia dan pemerataan pembangunan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden	100%
		2 Jumlah dokumen rencana kerja dan laporan tahunan di bidang dukungan kebijakan pembangunan manusia dan pemerataan pembangunan	2 dokumen

Kegiatan

- 1 Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Peningkatan dan Pengembangan Kesejahteraan
- 2 Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Bencana
- 3 Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia

Anggaran

- Rp 221.623.000,-
Rp 173.130.000,-
Rp 272.035.000,-

Kepala Sekretariat Wakil
Presiden

Mohamad Oemar

Jakarta, Januari 2019
Deputi Bidang Dukungan
Kebijakan Pembangunan Manusia
dan Pemerataan Pembangunan

Bambang Widianto



**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : C. Betty Manurung
Jabatan : Asisten Deputi Pembangunan Sumber Daya Manusia

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : Bambang Widianto
Jabatan : Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

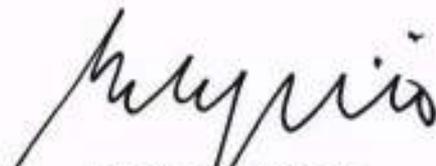
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Jakarta, Januari 2019

Pihak Pertama,



Bambang Widianto



C. Betty Manurung



**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
ASISTEN DEPUTI PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA**

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Terlaksananya hasil analisis kebijakan di bidang pembangunan sumber daya manusia	1 Persentase hasil analisis kebijakan di bidang pembangunan sumber daya manusia yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan	100%
		2 Jumlah dokumen rencana kerja dan laporan Asisten Deputi Pembangunan Sumber Daya Manusia	2 dokumen

Kegiatan:

Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia

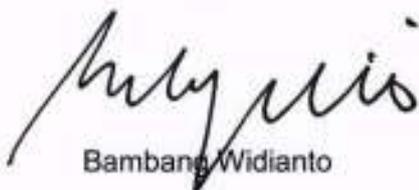
Anggaran:

Rp 272.035.000,-

Jakarta, Januari 2019

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan,

Asisten Deputi Pembangunan Sumber Daya Manusia,


Bambang Widianto


C. Betty Manurung



**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Mu'is

Jabatan : Asisten Deputi Perlindungan Sosial dan Penanggulangan
Bencana

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : Bambang Widiyanto

Jabatan : Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia
dan Pemerataan Pembangunan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua

Bambang Widiyanto

Pihak Pertama

Abdul Mu'is



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
ASISTEN DEPUTI PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENANGGULANGAN BENCANA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya hasil analisis kebijakan di bidang perlindungan sosial dan penanggulangan bencana	1. Persentase laporan hasil analisis kebijakan di bidang perlindungan sosial dan penanggulangan bencana yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan 2. Jumlah dokumen rencana kerja dan laporan Asisten Deputi Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Bencana	100% 2 dokumen

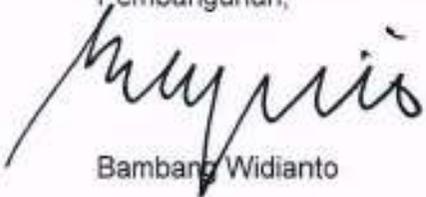
Kegiatan:
Pelaksanaan Dukungan Kebijakan kepada Wakil Presiden Bidang Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Bencana

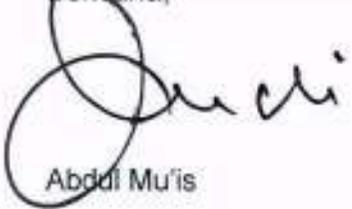
Anggaran: Rp.173.130.000,-

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan
Pembangunan Manusia dan Pemerataan
Pembangunan,

Jakarta, Januari 2019

Asisten Deputi
Perlindungan Sosial dan Penanggulangan
Bencana,


Bambang Widianto


Abddi Mu'is



**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pranggono Dwianto
Jabatan : Asisten Deputi Peningkatan dan Pengembangan Kesejahteraan

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : Bambang Widiyanto
Jabatan : Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan
Pemerataan Pembangunan

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

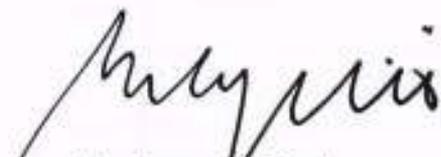
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Jakarta, Januari 2019

Pihak Pertama,



Bambang Widiyanto



Pranggono Dwianto



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
ASISTEN DEPUTI PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN
KESEJAHTERAAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya hasil analisis kebijakan di bidang peningkatan dan pengembangan kesejahteraan	1 Persentase hasil analisis kebijakan di bidang peningkatan dan pengembangan kesejahteraan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan	100%
		2 Jumlah dokumen rencana kerja dan laporan tahunan Asisten Deputi	2 dokumen

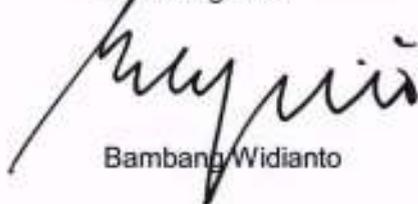
Kegiatan

Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Peningkatan dan Pengembangan Kesejahteraan

Anggaran

Rp 221.623.000,-

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan



Bambang Widianto

Jakarta, Januari 2019
Asdep Peningkatan dan Pengembangan Kesejahteraan



Pranggono Dwianto



**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Guntur Iman Nefianto, S.E., S.H., M.H.

Jabatan : Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : Drs. Mohamad Oemar, M.A.

Jabatan : Kepala Sekretariat Wakil Presiden

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Drs. Mohamad Oemar, M.A.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Pertama,

Guntur Iman Nefianto, S.E., S.H., M.H.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DEPUTI BIDANG DUKUNGAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas analisis kebijakan di bidang pemerintahan kepada Wakil Presiden	1. Persentase hasil analisis kebijakan di bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dalam membantu Presiden.	100%
		2. Jumlah dokumen rencana kerja dan laporan tahunan di bidang dukungan kebijakan pemerintahan yang sesuai standar.	2 dokumen

Kegiatan:

1. Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
2. Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Hubungan Luar Negeri.
3. Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.
4. Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan.
5. Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Komunikasi dan Informasi Publik.

Anggaran:

- Rp 176.637.000,00.
- Rp 180.610.000,00.
- Rp 207.112.000,00.
- Rp 192.370.000,00.
- Rp 184.355.000,00.

Kepala Sekretariat Wakil Presiden,



Drs. Mohamad Oemar, M.A.

Jakarta, Januari 2019

Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan,



Guntur Iman Nefianto, S.E., S.H., M.H.



**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Iqbal, S.E., S.H., M.Si.

Jabatan : Asisten Deputi Politik, Hukum, dan Keamanan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : Guntur Iman Nefianto, S.E., S.H., M.H.

Jabatan : Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

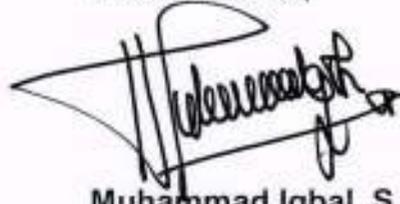
Pihak Kedua,



Guntur Iman Nefianto, S.E., S.H., M.H.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Pertama,



Muhammad Iqbal, S.E., S.H., M.Si.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
ASISTEN DEPUTI POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tertindakannya hasil analisis kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan	1. Persentase laporan hasil analisis kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan.	100%
		2. Jumlah dokumen rencana kerja dan laporan Asisten Deputi.	2 dokumen

Kegiatan:

Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Anggaran:

Rp 176.637.000,00.

Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan,



Guntur Iman Nefianto, S.E., S.H., M.H.

Jakarta, Januari 2019
Asisten Deputi Politik, Hukum, dan Keamanan,



Muhammad Iqbal, S.E., S.H., M.Si.



**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohamad Siradj Parwito, M.A

Jabatan : Asisten Deputi Hubungan Luar Negeri

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : Guntur Iman Nefianto, S.E., S.H., M.H.

Jabatan : Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

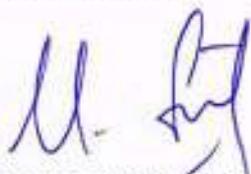
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


Guntur Iman Nefianto, S.E., S.H., M.H.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Pertama,


Mohamad Siradj Parwito, M.A

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
ASISTEN DEPUTI HUBUNGAN LUAR NEGERI**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya hasil analisis kebijakan di bidang hubungan luar negeri	1. Persentase laporan hasil analisis kebijakan di bidang hubungan luar negeri yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan.	100%
		2. Jumlah dokumen rencana kerja dan laporan Asisten Deputi.	2 dokumen

Kegiatan:

Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden
Bidang Hubungan Luar Negeri

Anggaran:

Rp 180.610.000

Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan
Pemerintahan,



Guntur Iman Nefianto, S.E., S.H., M.H.

Jakarta, Januari 2019
Asisten Deputi Hubungan Luar
Negeri



Mohamad Siradj Parwito, M.A



**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adhianti, S.IP., M.Si.
Jabatan : Asisten Deputi Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : Guntur Iman Nefianto, S.E., S.H., M.H.
Jabatan : Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Guntur Iman Nefianto, S.E., S.H., M.H.

Jakarta, Januari 2019
Pihak Pertama,

Adhianti, S.IP., M.Si.



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
ASISTEN DEPUTI REFORMASI BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tertelaksananya hasil analisis kebijakan di bidang reformasi birokrasi dan pelayanan publik	1. Persentase laporan hasil analisis kebijakan di bidang reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan.	100%
		2. Jumlah dokumen rencana kerja dan laporan tahunan di Bidang Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.	2 dokumen

Kegiatan:

Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden
Bidang Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Anggaran:

Rp207.112.000,00

Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan
Pemerintahan,

Guntur Inan Nefianto, S.E., S.H., M.H.

Jakarta, Januari 2019

Asisten Deputi Reformasi Birokrasi dan
Pelayanan Publik,

Adhianti, S.IP., M.Si.



**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Dra. Sri Mulyani, M.Si.
jabatan : Asisten Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama : Guntur Iman Nefianto, S.E., S.H., M.H.
jabatan : Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,

Guntur Iman Nefianto, S.E., S.H., M.H.

Pihak Pertama,

Dra. Sri Mulyani, M.Si.



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
ASISTEN DEPUTI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya hasil analisis kebijakan di bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1 Persentase laporan hasil analisis kebijakan di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan. 2 Jumlah dokumen rencana kerja dan laporan Asisten Deputi	100% 2 dokumen

Kegiatan

Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden
Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Anggaran

Rp192.370.000,-

Plt. Deputi Bidang Dukungan
Kebijakan Pemerintahan,

Guntur Iman Nefianto, S.E., S.H., M.H.

Jakarta, Januari 2019
Asisten Deputi Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan,

Dra. Sri Mulyani, M.Si.



**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Rusmin Nuryadin
jabatan : Asisten Deputi Komunikasi dan Informasi Publik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama : Guntur Iman Nefianto
jabatan : Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,

Guntur Iman Nefianto

Pihak Pertama,

Rusmin Nuryadin

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
ASISTEN DEPUTI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya hasil analisis kebijakan di bidang komunikasi dan informasi publik.	1. Persentase laporan hasil analisis kebijakan di bidang komunikasi dan informasi publik yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan.	100%
		2. Persentase dukungan pelayanan kepada wartawan media massa, terkait dukungan logistik dan peliputan kegiatan Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden yang disusun.	100%
		3. Persentase dukungan diseminasi informasi kegiatan Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden dan kegiatan Kesekretariatan melalui media Setwapres yang diselesaikan.	100%
		4. Persentase dukungan peliputan dan dokumentasi kegiatan Wakil Presiden dan/atau Istri/Suami Wakil Presiden, dan Kegiatan Kesekretariatan yang disusun.	100%

		5. Jumlah dokumen rencana kerja dan laporan Asisten Deputi.	2 dokumen
--	--	---	-----------

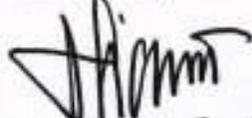
Kegiatan

Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Presiden
Bidang Komunikasi dan Informasi Publik

Anggaran

Rp184.355.000,00

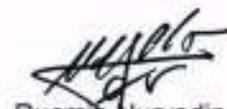
Pihak Kedua,



Guntur Iman Nefianto

Jakarta, Januari 2019

Pihak Pertama,



Rusmin Nuryadin



**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Guntur Iman Nefianto
Jabatan : Deputy Bidang Administrasi

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : Mohamad Oemar
Jabatan : Kepala Sekretariat Wakil Presiden

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Mohamad Oemar

Jakarta, Januari 2019
Pihak Pertama,

Guntur Iman Nefianto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pemberian dukungan pelayanan keprotokolan dan kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden	1 Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Wakil Presiden	4,44
		2 Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden	4,44
		3 Indeks kepuasan pengguna layanan perencanaan anggaran, pengelolaan keuangan, dan pelaporan keuangan	4,44
		4 Indeks kepuasan pengguna layanan manajemen kinerja	4,44
		5 Indeks kepuasan pengguna layanan administrasi ketatausahaan	4,44
		6 Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan kepegawaian	4,44
		7 Indeks kepuasan pengguna layanan teknologi informasi	4,44
		8 Indeks kepuasan pengguna layanan kesehatan	4,44
		9 Indeks kepuasan layanan penyediaan sarana dan prasarana bagi Wakil Presiden	4,44
		10 Jumlah laporan pengelolaan dana operasional Wakil Presiden	1 laporan
		11 Jumlah rencana kerja dan laporan di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang disusun	2 dokumen

Kegiatan:

Program Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Kementerian Sekretariat
Negara

Anggaran:

Rp104,646.971.000,00

Jakarta, Januari 2019

Kepala Sekretariat Wakil Presiden,

Deputi Bidang Administrasi,



Mohamad Oemar



Guntur Iman Nefianto



**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sapto Harjono W.S.
Jabatan : Kepala Biro Protokol

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Guntur Iman Nefianto
Jabatan : Deputi Bidang Administrasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,

Guntur Iman Nefianto

Pihak Pertama,

Sapto Harjono W.S.



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BIRO PROTOKOL

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya urusan pemberian dukungan acara dan persidangan, kerumahtanggaan, perjalanan, pengelolaan naskah pidato/notulen dan penerjemahan bagi Wakil Presiden yang berkualitas	1 Indeks kelancaran pemberian dukungan pelayanan keprotokolan kepada Wakil Presiden dan/atau istri/suami Wakil Presiden	4,55
		2 Indeks kelancaran pemberian dukungan kerumahtanggaan kepada Wakil Presiden	4,55
		3 Indeks kelancaran pelaksanaan urusan kerumahtanggaan di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden	4,55
		4 Jumlah dokumen rencana kerja dan laporan Biro Protokol	2 dokumen

Kegiatan:

Pelaksanaan Dukungan
Keprotokolan Wakil Presiden

Anggaran:

Rp50.390.491.000,00

Jakarta, Januari 2019

Deputi Bidang Administrasi,

Kepala Biro Protokol,

Guntur Iman Nefianto

Sapto Harjono W.S.



**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Purwono Prihantoro B.T.
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : Guntur Iman Nefianto
Jabatan : Deputi Bidang Administrasi

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Guntur Iman Nefianto

Jakarta, Januari 2019
Pihak Pertama,

Purwono Prihantoro B.T.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Terlaksananya perencanaan dan evaluasi penganggaran, pengelolaan keuangan, penyusunan laporan keuangan dan akuntansi barang milik negara, serta manajemen kinerja Sekretariat Wakil Presiden yang berkualitas.	1	Indeks kepuasan pengguna layanan perencanaan anggaran	4,44
		2	Indeks kepuasan pengguna layanan pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan	4,44
		3	Indeks kepuasan pengguna layanan pelaporan akuntansi dan barang milik negara	4,44
		4	Indeks kepuasan pengguna layanan manajemen kinerja	4,44
		5	Jumlah laporan pengelolaan dana operasional Wakil Presiden dan dana bantuan kemasyarakatan	2 laporan
		6	Jumlah rencana kerja dan laporan Biro Perencanaan dan Keuangan	2 dokumen

Kegiatan:

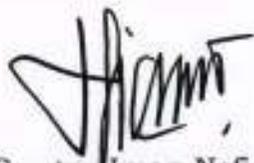
Pelaksanaan dukungan perencanaan anggaran, keuangan, dan manajemen kinerja.

Anggaran:

Rp9.280.282.000,00

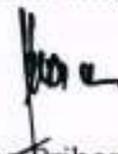
Jakarta, Januari 2019

Deputi Bidang Administrasi,



Guntur Iman Nefianto

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan,



Purwono Prihantoro B.T.



**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Slamet Widodo

Jabatan : Kepala Biro Tata Usaha, Teknologi Informasi, dan Kepegawaian

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : Guntur Iman Nefianto

Jabatan : Deputi Bidang Administrasi

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,

Guntur Iman Nefianto

Pihak Pertama,

Slamet Widodo



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BIRO TATA USAHA, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN KEPEGAWAIAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terlaksananya urusan ketatausahaan, pengelolaan teknologi informasi, dan kepegawaian, pengoordinasian evaluasi organisasi dan tata laksana serta pelayanan kesehatan pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden yang berkualitas.	1	Indeks Kepuasan Layanan Ketatausahaan	4,44
		2	Indeks Kepuasan Pengelolaan Teknologi Informasi	4,44
		3	Indeks Kepuasan Pengelolaan Kepegawaian	4,44
		4	Indeks Kepuasan Layanan Kesehatan	4,44
		5	Jumlah laporan analisis, evaluasi, penyusunan, dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, analisis jabatan, evaluasi jabatan, dan standar kompetensi jabatan	1 laporan
		6	Jumlah rencana kerja Biro Tata Usaha, Teknologi Informasi, dan Kepegawaian	1 dokumen
		7	Jumlah laporan Biro Tata Usaha, Teknologi Informasi, dan Kepegawaian	1 laporan

Kegiatan:

Pelaksanaan dukungan tata usaha, teknologi informasi, dan kepegawaian

Anggaran:

Rp8,054,999.000,00

Jakarta, Januari 2019

Deputi Bidang Administrasi,

Guntur Iman Nefianto

Kepala Biro Tata Usaha, Teknologi Informasi, dan Kepegawaian,

Slamet Widodo



**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azhari Maulana
Jabatan : Kepala Biro Umum

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : Guntur Iman Nefianto
Jabatan : Deputi Bidang Administrasi

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,

Guntur Iman Nefianto

Pihak Pertama,

Azhari Maulana



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BIRO UMUM

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Tersedianya sarana dan prasarana Sekretariat Wakil Presiden yang berkualitas	1.	Indeks Kepuasan ketersediaan sarana dan prasarana perlengkapan	4,44
		2.	Indeks Kepuasan ketersediaan sarana dan prasarana gedung dan bangunan	4,44
		3.	Indeks Kepuasan ketersediaan sarana dan prasarana kendaraan	4,44
		4.	Indeks Kepuasan penyelenggaraan ketertiban keamanan dalam	4,44
		5.	Indeks Kepuasan pengelolaan perpustakaan	4,44
		6.	Jumlah rencana kerja dan Laporan yang disusun Biro Umum	2 Laporan

Kegiatan:

Pelaksanaan dukungan Sarana dan Prasarana Sekretariat Wakil Presiden

Jakarta, Januari 2019

Anggaran:

Rp. 35.808.338.000

Deputi Bidang Administrasi,

Guntur Iman Nefianto

Kepala Biro Umum,

Azhari Maulana

SEKRETARIAT MILITER PRESIDEN



**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT MILITER PRESIDEN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Trisno Hendradi
jabatan : Sekretaris Militer Presiden

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama : Pratikno
jabatan : Menteri Sekretaris Negara

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Pratikno

Jakarta, Januari 2019
Pihak Pertama,

Trisno Hendradi

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT MILITER PRESIDEN**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya kegiatan VVIP, dukungan administrasi personel TNI dan Polri, dan penganugerahan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan yang berkualitas	1. Persentase pelayanan administrasi personel TNI dan Polri yang disetujui oleh Presiden 2. Persentase pelaksanaan kegiatan VVIP yang aman 3. Persentase dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang disetujui oleh Presiden	100% 100% 100%
2.	Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Militer Presiden	1. Indeks kepuasan pengguna layanan di lingkungan Sekretariat Militer Presiden	3,9 (skala 5)

Program

1. Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden
2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Negara

Anggaran

Rp24.965.764.000
Rp6.005.012.000

Menteri Sekretaris Negara,



Pratikno

Jakarta, Januari 2019
Sekretaris Militer Presiden,



Trisno Hendradi



**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT MILITER PRESIDEN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Basuki Nugroho
jabatan : Kepala Biro Personel TNI dan Polri

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama : Trisno Hendradi
jabatan : Sekretaris Militer Presiden

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Trisno Hendradi

Jakarta, Januari 2019
Pihak Pertama,

Basuki Nugroho

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BIRO PERSONEL TNI DAN POLRI**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya dukungan administrasi pengangkatan, kenaikan pangkat dan pemberhentian personel TNI dan Polri yang tepat dan akurat	Persentase rancangan Keputusan Presiden tentang pengangkatan, kenaikan pangkat dan pemberhentian personel TNI dan Polri yang diselesaikan sesuai standar	100%
a.	Rancangan Naskah Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pengangkatan, Kenaikan Pangkat, dan Pemberhentian Personel TNI dan Polri	a. Persentase penyelesaian Rancangan Naskah Keputusan Presiden (Keppres) tentang pengangkatan, kenaikan pangkat, dan pemberhentian personel TNI dan Polri yang wewenang penetapannya berada pada Presiden sesuai standar pelayanan	100%
b.	Layanan Penyelenggaraan Upacara Kenegaraan dan Pelantikan TNI dan Polri	b. Persentase layanan penyelenggaraan upacara kenegaraan dan pelantikan TNI dan Polri yang dilaksanakan sesuai rencana	100%
c.	Layanan Pembinaan Personel TNI dan Polri di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet	c. Persentase layanan pembinaan personel TNI dan Polri di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet sesuai standar pelayanan	100%

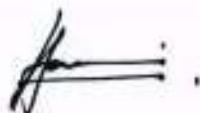
Kegiatan

1. Penyelenggaraan Dukungan Teknis dan Administrasi Personel TNI dan Polri

Anggaran

Rp1.753.010.000

Sekretaris Militer Presiden,



Trisno Hendradi

Jakarta, Januari 2019
Karo Personel TNI dan Polri,



Basuki Nugroho



**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT MILITER PRESIDEN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Ronald L. Siregar
jabatan : Kepala Biro Pengamanan

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama : Trisno Hendradi
jabatan : Sekretaris Militer Presiden

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Trisno Hendradi

Jakarta, Januari 2019
Pihak Pertama,

Ronald L. Siregar

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BIRO PENGAMANAN**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya koordinasi pengamanan VVIP yang efektif	Persentase penyelenggaraan koordinasi pengamanan fisik dan non fisik VVIP yang dilaksanakan sesuai standar	100%
	Layanan pengamanan VVIP	Persentase layanan pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat Kepala Negara / Kepala Pemerintahan negara asing (VVIP) sesuai standar pelayanan	100%

Kegiatan

1. Pengkoordinasian Pengamanan Fisik dan Non Fisik Bagi VVIP

Anggaran

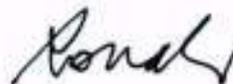
Rp3.237.289.000

Sekretaris Militer Presiden,



Trisno Hendradi

Jakarta, Januari 2019
Karo Pengamanan,



Ronald L. Siregar



**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT MILITER PRESIDEN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Imam Suprayitno
jabatan : Kepala Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama : Trisno Hendradi
jabatan : Sekretaris Militer Presiden

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Trisno Hendradi

Jakarta, Januari 2019
Pihak Pertama,

Imam Suprayitno

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BIRO GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya dukungan administrasi penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang tepat dan akurat	1. Persentase rancangan Keputusan Presiden tentang penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang diselesaikan sesuai standar 2. Persentase kelengkapan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang didistribusikan	100% 100%
a.	Rancangan Naskah Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan	a. Persentase penyelesaian Rancangan Keppres tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan sesuai Standar Pelayanan	100%
b.	Layanan Penganugerahan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan	b. Persentase layanan penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan	100%

Kegiatan

1. Penyelenggaraan Administrasi Penganugerahan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

Anggaran

Rp19.975.465.000

Sekretaris Militer Presiden,



Trisno Hendradi

Jakarta, Januari 2019

Karo Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan,



Iham Suprayitno



**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
SEKRETARIAT MILITER PRESIDEN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Putu Jayan Danu Putra
jabatan : Kepala Biro Umum

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama : Trisno Hendradi
jabatan : Sekretaris Militer Presiden

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Trisno Hendradi

Jakarta, Januari 2019
Pihak Pertama,

Putu Jayan Danu Putra

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BIRO UMUM**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya dukungan administrasi umum di lingkungan Sekretariat Militer Presiden yang optimal	a. Indeks kepuasan pengguna layanan administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan b. Indeks kepuasan pengguna layanan administrasi keuangan c. Indeks kepuasan pengguna layanan administrasi kepegawaian d. Indeks kepuasan pengguna layanan administrasi ketatausahaan dan perlengkapan	3,9 3,9 3,9 3,9
a.	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	a. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan b. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan administrasi keuangan c. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan administrasi kepegawaian d. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan ketatausahaan dan perlengkapan	3,9 3,9 3,9 3,9
b.	Layanan Perkantoran	e. Persentase Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan f. Persentase Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor	100% 100%

Kegiatan

1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat Militer Presiden

Anggaran

Rp6.005.012.000

Sekretaris Militer Presiden,



Trisno Hendradi

Jakarta, Januari 2019
Karo Umum,



Putu Jayan Danu Putra

**DEPUTI BIDANG HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN**



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Lydia Silvanna Djaman
jabatan : Deputy Bidang Hukum dan Perundang-undangan

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama : Pratikno
jabatan : Menteri Sekretaris Negara

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Pratikno

Jakarta, Januari 2019

Pihak Pertama,

Lydia Silvanna Djaman

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas analisis dan penyelesaian izin prakarsa, Rancangan Peraturan Perundang-undangan, pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi	Persentase hasil analisis Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara	100%
		Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris Negara	100%
		Persentase Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan	100%

Kegiatan

Kegiatan	Anggaran
1. Pelaksanaan Analisis dan Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian	Rp 137.954.000
2. Pelaksanaan Analisis dan Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Rp 308.320.000
3. Pelaksanaan Analisis dan Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah	Rp 114.202.000
4. Pelaksanaan Analisis dan Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Rp 210.344.000
5. Pelaksanaan Analisis dan Administrasi di Bidang Litigasi dan Bantuan Hukum, Ekstradisi, Prerogatif dan Naturalisasi, serta Pengadministrasian Peraturan Perundang-undangan	Rp 870.811.000

Menteri Sekretaris Negara,



Pratikno

Jakarta, Januari 2019

Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



Lydia Silvanna Djaman



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Budi Setiawati
jabatan : Asisten Deputi Bidang Hukum

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama : Lydia Silvanna Djaman
jabatan : Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Lydia Silvanna Djaman

Budi Setiawati

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
ASISTEN DEPUTI BIDANG HUKUM**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya hasil analisis dan penyelesaian izin prakarsa, Rancangan Peraturan Perundang-undangan, pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi yang berkualitas.	Persentase hasil analisis Rancangan Peraturan Perundang-undangan di bidang perjanjian internasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan	100%
		Persentase hasil analisis dan pendapat hukum terkait litigasi dan permasalahan hukum, grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi dan remisi perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara dan naturalisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan	100%
		Persentase rancangan peraturan perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan	100%
		Persentase Rancangan Keputusan Presiden dan Surat Kuasa Khusus Presiden yang akan ditetapkan/ditandatangani oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan	100%

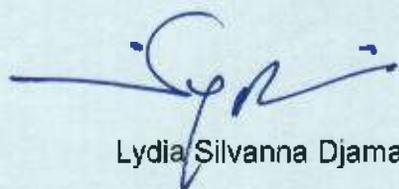
Kegiatan

Pelaksanaan Analisis dan Administrasi di Bidang Litigasi dan Bantuan Hukum, Ekstradisi, Prerogatif dan Naturalisasi, serta Pengadministrasian Peraturan Perundang-undangan

Anggaran

Rp 870.811.000,-

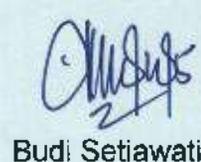
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



Lydia Silvanna Djaman

Jakarta, Januari 2019

Asisten Deputi Bidang Hukum,



Budi Setiawati



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Tuti Trihastuti Sukardi
jabatan : Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama : Lydia Silvanna Djaman
jabatan : Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Lydia Silvanna Djaman

Jakarta, Januari 2019

Pihak Pertama,

Tuti Trihastuti Sukardi

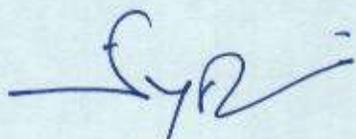
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
ESELON II**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya hasil analisis dan penyelesaian izin prakarsa rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah yang berkualitas.	1. Persentase hasil analisis rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan.	100%
		2. Persentase rancangan peraturan perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang administrasinya telah diselesaikan.	100%

Kegiatan

Pelaksanaan analisis dan penyelesaian peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah

Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



Lydia Silvanna Djaman

Anggaran

Rp. 114.202.000,-

Jakarta, Januari 2019

Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah,



Tuti Trihastuti Sukardi



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hayu Sihwati Lestari

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Perekonomian

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : Lydia Silvanna Djaman

Jabatan : Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Lydia Silvanna Djaman

Jakarta, 17 Januari 2019
Pihak Pertama,

Hayu Sihwati Lestari

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
ASISTEN DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Tersedianya hasil analisis dan penyelesaian izin prakarsa, Rancangan Peraturan Perundang-undangan di bidang perekonomian yang berkualitas.	Persentase hasil analisis Rancangan Peraturan Perundang-undangan di bidang perekonomian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditindak-lanjuti oleh Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan.	100%
		Persentase Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan.	100%

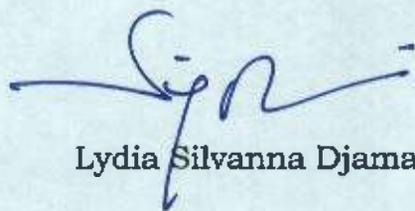
Kegiatan

Pelaksanaan analisis dan penyelesaian peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian.

Anggaran

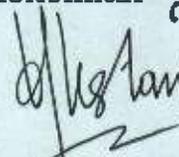
Rp137.954.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Deputi Bidang Hukum
dan Perundang-undangan



Lydia Silvanna Djaman

Jakarta, 17 Januari 2019
Asisten Deputi Bidang
Perekonomian



Hayu Sihwati Lestari



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Hanung Cahyono
jabatan : Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

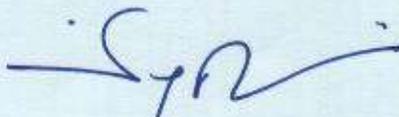
Nama : Lydia Silvanna Djaman
Jabatan : Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

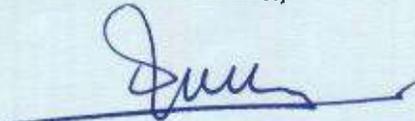
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



Lydia Silvanna Djaman

Jakarta, Januari 2019
Pihak Pertama,



Hanung Cahyono

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
ESELON II**

No (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Tersedianya hasil analisis dan penyelesaian izin prakarsa, rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang berkualitas	1. Persentase hasil analisis Rancangan Peraturan Perundang-undangan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan.	100%
		2. Persentase rancangan peraturan perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan	100%

Kegiatan

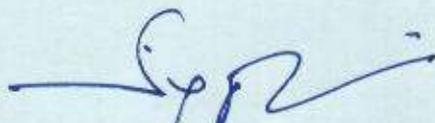
Pelaksanaan analisis dan penyelesaian peraturan Perundang-undangan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan

Anggaran

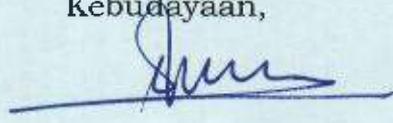
Rp. 308.320.000,00

Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Jakarta, Januari 2019
Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,



Lydia Silvanna Djaman



Hanung Cahyono



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : M. Rokib
jabatan : Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : Lydia Silvanna Djaman
Jabatan : Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan
selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Jakarta, Januari 2019
Pihak Pertama,

Lydia Silvanna Djaman

M. Rokib

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
ESELON II**

No (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Tersedianya hasil analisis dan penyelesaian izin prakarsa, rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik, hukum dan keamanan	1. Persentase hasil analisis Rancangan Peraturan Perundang-undangan di bidang politik, hukum dan keamanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan.	100%
		2. Persentase rancangan peraturan perundang-undangan yang akan disahkan/ditetapkan oleh Presiden yang administratifnya telah diselesaikan	100%

Kegiatan

Pelaksanaan analisis dan penyelesaian peraturan Perundang-undangan bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Anggaran

Rp. 210.344.000,00

Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Jakarta, Januari 2019
Asisten Deputi Bidang Politik, Politik, Hukum dan Keamanan,



Lydia Silvanna Djaman



M. Rokib

**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI APARATUR**

Surat No.	: M-66/D-1/Hkm/AK.00/01/2019
Tanggal	: 22-01-2019
Dari	: Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan
Lampiran	: 1 Berkas

Diterima tgl	: 24-01-2019
Agenda No.	: 0215/D-3/ 2019

Ditujukan Kepada :	
<input type="checkbox"/>	Kepala Biro Administrasi Pejabat Negara
<input type="checkbox"/>	Kepala Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan
<input type="checkbox"/>	Kepala Biro Sumber Daya Manusia
<input checked="" type="checkbox"/>	Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja
<input type="checkbox"/>	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
<input type="checkbox"/>

Catatan :

1. Dilarang memisahkan sehelai suratpun dari berkas yang telah disusun ini.
2. Jika mengenai rahasia, bantulah memelihara kerahasiaan Negara.
3. Jika surat ini sudah tidak diperlukan lagi, mohon agar dikembalikan ke Biro Arsip.

Perihal :
Penyampaian Perjanjian Kinerja Pejabat dan Pegawai di Kedeputan Bidan Hukum dan Perundang-undangan

LAJUR DISPOSISI :	Paraf	Tgl.
<i>Teliti dan penanganannya.</i>	<i>[Signature]</i>	<i>24/01/19</i>
<i>Yth. Kabag AK-II</i> <i>- Ting agar ditindaklanjuti</i> <i>- diteliti & sesuaikan dg IKU sat.org ybr</i>	<i>[Signature]</i>	<i>25/01/2019</i>
<i>Yth. Kasbg PPK II</i> <i>- U/ discan</i> <i>- Wat Runstranya</i>	<i>[Signature]</i>	<i>25/1</i>
<i>- Punya Pak Rohib kalo sdh ttd. sbg Asdep. per bgm perlakuannya?</i>		

**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

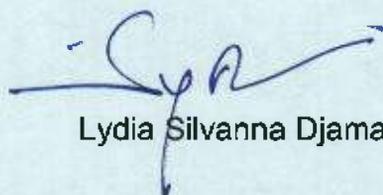
MEMORANDUM

Nomor M- 66 /D-1/Hkm/AK.00/01/2019

Yth. : Deputi Bidang Administrasi Aparatur
Dari : Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan
Hal : Penyampaian Perjanjian Kinerja Pejabat dan Pegawai di Kedeputian
Bidang Hukum dan Perundang-undangan Tahun 2019
Tanggal : 22 Januari 2019

Sehubungan memorandum Saudara Deputi nomor M-30/D-3/AK.00/01/2019, tanggal 10 Januari 2019, hal Penyusunan Perjanjian Kinerja di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2019, bersama ini kami sampaikan Perjanjian Kinerja Pejabat dan Pegawai di Kedeputian Bidang Hukum dan Perundang-undangan Tahun 2019, guna tindak lanjut penyelesaian administratifnya.

Atas perhatian dan kerja sama Deputi, kami ucapkan terima kasih.



Lydia Silvanna Djaman

211 /D-1/1/2019

TC. 24 - 01 2019

**DEPUTI BIDANG
HUBUNGAN KELEMBAGAAN
DAN KEMASYARAKATAN**



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

nama : Dadan Wildan
jabatan : Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama : Pratikno
jabatan : Menteri Sekretaris Negara

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Pratikno

Jakarta, Januari 2019

Pihak Pertama,

Dadan Wildan

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DEPUTI BIDANG HUBUNGAN
KELEMBAGAAN DAN KEMASYARAKATAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya hubungan kelembagaan antara Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik, serta terselenggaranya hubungan masyarakat	Persentase dukungan teknis, administrasi, dan analisis yang ditindaklanjuti Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara dalam rangka hubungan dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi politik, serta hubungan masyarakat.	100%
2	Terselenggaranya penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara	Persentase pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri Sekretaris Negara yang ditindaklanjuti	45%
3	Terselenggaranya kegiatan hubungan masyarakat di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	Indeks pelayanan informasi publik pada penerimaan kunjungan delegasi masyarakat dan/atau perguruan tinggi di Kementerian Sekretariat Negara.	3,9 dalam skala 5

Kegiatan

1. Pelaksanaan hubungan dengan lembaga negara, lembaga non struktural dan lembaga daerah
2. Pelaksanaan hubungan dengan organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik
3. Penanganan pengaduan masyarakat
4. Penyelenggaraan hubungan masyarakat terkait kegiatan Presiden, Wakil Presiden, dan Kementerian Sekretariat Negara

Menteri Sekretaris Negara,



Pratikno

Anggaran

Rp. 3.237.183.000,-

Jakarta, Januari 2019

Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan



Dadan Wildan



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : M. Ari Setiawan, S.E., M.M.
jabatan : Asisten Deputi Hubungan Organisasi Masyarakat dan Organisasi Politik

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama : Prof. Dr. H. Dadan Wildan, M.Hum.
jabatan : Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Masyarakat

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Prof. Dr. H. Dadan Wildan, M.Hum.

Jakarta, Januari 2019
Pihak Pertama,

M. Ari Setiawan, S.E., M.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
ASISTEN DEPUTI HUBUNGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN ORGANISASI POLITIK

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terselenggaranya hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan antara Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik	Persentase dukungan administrasi dan analisis dalam rangka penyelenggaraan hubungan kelembagaan antara Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik yang dilaksanakan sesuai dengan standar	100%

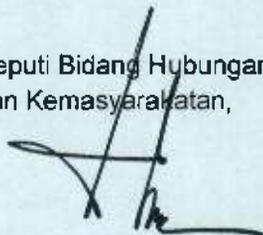
Kegiatan

Pelaksanaan Hubungan dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik

Anggaran

Rp713.741.000,-

Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan
dan Kemasyarakatan,



Prof. Dr. Dadan Wildan, M.Hum.
NIP. 196709241990031001

Jakarta, Januari 2019
Asisten Deputi Hubungan Organisasi
Kemasyarakatan dan Organisasi Politik,



M. Ari Setiawan, S.E., M.M
NIP. 196707101994031012



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

nama : Drs. Masrokhani, MPA.
jabatan : Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Daerah,
Kementerian Sekretariat Negara

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama : Prof. Dr.H. Dadan Wildan, M.Hum.
jabatan : Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Masyarakat,
Kementerian Sekretariat Negara

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Prof. Dr.H. Dadan Wildan, M.Hum.

Jakarta, Januari 2019
Pihak Pertama,

Drs. Masrokhani, MPA.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
ESELON II**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan antara Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan Lembaga Negara dan Daerah	Jumlah laporan hasil koordinasi dan/atau pemantauan kegiatan-kegiatan Lembaga Non Struktural, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Kementerian dan Lembaga Daerah kepada Deputi Hublemmas/Mensesneg/Presiden	10
2		Jumlah laporan hasil koordinasi dan/atau pelaksanaan kunjungan kerja dengan Lembaga Negara kepada Deputi Hublemmas/Mensesneg/Presiden	14
3		Jumlah laporan hasil penyelenggaraan kegiatan-kegiatan koordinasi dalam rangka Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, dan Rapat Koordinasi	4
4		Jumlah laporan hasil pelaksanaan koordinasi dukungan penyelenggaraan hubungan kelembagaan	15
5		Jumlah laporan hasil penyelenggaraan kegiatan-kegiatan koordinasi terkait dinamika Lembaga Negara, Lembaga Non Struktural, Lembaga Daerah, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan Kementerian kepada Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan	100%
6		Persentase penanganan memorandum dan surat saran dan masukan terhadap permohonan serta aspirasi dari Lembaga Negara, Lembaga Non Struktural, Lembaga Daerah, Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Kementerian yang dilaporkan/disampaikan kepada Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara sesuai dengan standar	100%
7		Persentase penanganan memorandum dan surat berkaitan dengan dinamika dan aspirasi dari Lembaga Negara, Lembaga Non Struktural, Lembaga Daerah, Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Kementerian yang ditindaklanjuti kepada instansi terkait dan/atau diselesaikan secara internal pada Deputi/Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Daerah sesuai dengan standar	100%
8		Jumlah laporan hasil koordinasi penyelenggaraan pidato kenegaraan dalam Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka HUT Proklamasi Kemerdekaan RI, pidato kenegaraan di depan Rapat Paripurna DPR RI mengenai RAPBN, dan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI	1

9		Persentase laporan hasil koordinasi acara Konsultasi, Rapat Kerja, dan Rapat Dengar Pendapat antara Presiden/Mensesneg dengan Lembaga Negara (DPR RI)	100%
10		Persentase laporan hasil pengarahannya penyusunan dokumentasi acara Konsultasi, Rapat Kerja, dan Rapat Dengar Pendapat antara Presiden/Mensesneg dengan Lembaga Negara (DPR RI)	100%

Kegiatan

Pelaksanaan Hubungan dengan Lembaga Negara, Lembaga Non Struktural dan Lembaga Daerah

Anggaran

Rp698.132.000,00

Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Masyarakat,

Prof. Dr.H. Dadan Wildan, M.Hum.

Jakarta, Januari 2019

Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Daerah,

Drs. Masrokhan, MPA.



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Eddy Cahyono Sugiarto, S.Sos., M.Si.

jabatan : Asisten Deputi Hubungan Masyarakat

selanjutnya disebut Pihak Pertama

nama : Prof. Dr. H. Dadan Wildan, M.Hum

jabatan : Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sebenarnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,

Prof. Dr. H. Dadan Wildan, M.Hum,

Pihak Pertama,

Eddy Cahyono Sugiarto, S.Sos., M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
ESELON II /ASISTEN DEPUTI HUBUNGAN MASYARAKAT

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)		(3)	(4)
1.	Terselenggaranya hubungan masyarakat di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara sesuai dengan standar.	1.	Persentase pelayanan informasi publik sesuai dengan standar	100%
		2.	Persentase hasil monitoring dan analisis media sesuai dengan standar	100%
		3.	Persentase kegiatan peliputan dan dokumentasi Kementerian Sekretariat Negara sesuai dengan standar.	100%
		4.	Persentase diseminasi informasi sesuai dengan standar.	100%
		5.	Persentase penanganan surat terkait permohonan kepada Presiden/dan atau Menteri Sekretaris Negara mengenai kegiatan kehumasan sesuai standar	100%
		6.	Persentase kegiatan komunikasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.	100%
		7.	Indeks pelayanan informasi publik pada penerimaan kunjungan delegasi masyarakat dan/atau perguruan tinggi di Kementerian Sekretariat Negara	3,9

Kegiatan

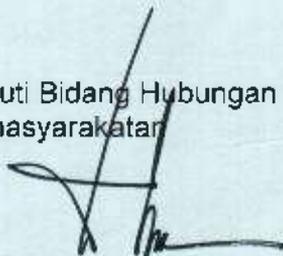
Penyelenggaraan kehumasan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

Anggaran

Rp884.302,00

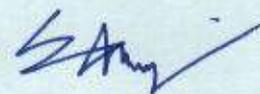
Jakarta, Januari 2019

Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan
Kemasyarakatan



Prof. Dr. H. Dadan Wildan, M.Hum

Asisten Deputi Hubungan Masyarakat



Eddy Cahyono Sugiarto, S.Sos., M.Si.



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

nama : R.Hadi Nugroho, S.Sos., M.Si.
jabatan : Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama : Prof. Dr. H. Dadan Wildan, M.Hum.
jabatan : Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

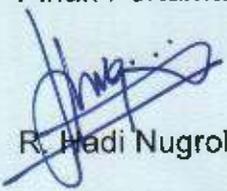
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


Prof. Dr. H. Dadan Wildan, M.Hum.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Pertama,


R. Hadi Nugroho, S.Sos., M.Si.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DEPUTI BIDANG HUBUNGAN
KELEMBAGAAN DAN KEMASYARAKATAN**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(2)	(3)	(4)
Terselenggaranya penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara	Persentase penanganan pengaduan Masyarakat yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri sekretaris Negara	45%
	Jumlah laporan pemantauan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat	12 laporan
	Jumlah laporan koordinasi dalam rangka optimalisasi penanganan pengaduan masyarakat	26 laporan
	Jumlah laporan bulanan dan tahunan penanganan pengaduan masyarakat	13 laporan (terdiri atas 12 laporan bulanan dan 1 laporan tahunan)
	Jumlah laporan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat	1 laporan
	Jumlah laporan pembenahan arsip pengaduan masyarakat	1 laporan
	Jumlah laporan pengembangan aplikasi pengaduan masyarakat	1 laporan

Kegiatan:

Penanganan Pengaduan Masyarakat

Anggaran

Rp. 941.008.000

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,

Prof. Dr. H. Dadan Wildan, M.Hum.

Pihak Pertama,

R. Hadi Nugrocho, S.Sos., M.Si.



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

nama : R.Hadi Nugroho, S.Sos., M.Si.
jabatan : Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama : Prof. Dr. H. Dadan Wildan, M.Hum.
jabatan : Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Prof. Dr. H. Dadan Wildan, M.Hum.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Pertama,

R. Hadi Nugroho, S.Sos., M.Si.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DEPUTI BIDANG HUBUNGAN
KELEMBAGAAN DAN KEMASYARAKATAN**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(2)	(3)	(4)
Terselenggaranya penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri Sekretaris Negara	Persentase penanganan pengaduan Masyarakat yang disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri sekretaris Negara	45%
	Jumlah laporan pemantauan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat	12 laporan
	Jumlah laporan koordinasi dalam rangka optimalisasi penanganan pengaduan masyarakat	26 laporan
	Jumlah laporan bulanan dan tahunan penanganan pengaduan masyarakat	13 laporan (terdiri atas 12 laporan bulanan dan 1 laporan tahunan)
	Jumlah laporan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat	1 laporan
	Jumlah laporan pembenahan arsip pengaduan masyarakat	1 laporan
	Jumlah laporan pengembangan aplikasi pengaduan masyarakat	1 laporan

Kegiatan:

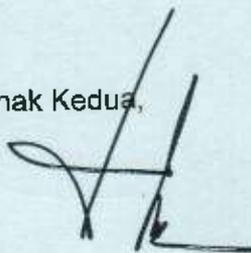
Penanganan Pengaduan Masyarakat

Anggaran

Rp. 941.008.000

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,



Prof. Dr. H. Dadan Wildan, M.Hum.

Pihak Pertama,



R. Hadi Nugroho, S.Sos., M.Si.

**DEPUTI BIDANG
ADMINISTRASI APARATUR**



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Cecep Sutiawan
jabatan : Deputy Bidang Administrasi Aparatur

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama : Pratikno
jabatan : Menteri Sekretaris Negara

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,

Pratikno

Pihak Pertama,

Cecep Sutiawan

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI APARATUR**

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas dukungan teknis dan administrasi penanganan administrasi pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan pejabat lainnya	Persentase Rancangan Keputusan Presiden tentang pengangkatan, pemberhentian, dan pensiun pejabat negara dan pejabat lainnya yang disetujui oleh Menteri Sekretaris Negara	100%
	Persentase Rancangan Keputusan Presiden tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat pemerintahan dan pejabat lainnya yang disetujui oleh Menteri Sekretaris Negara	100%
	Persentase Rancangan Keputusan Presiden tentang kenaikan pangkat, pemberhentian, dan pensiun Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional Jenjang Utama yang disetujui oleh Menteri Sekretaris Negara	100%
Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia	Persentase pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100%
	Indeks kepuasan layanan administrasi kepegawaian di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	3,5 dalam skala 5
	Indeks kepuasan peserta pendidikan dan pelatihan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	4,2 dalam skala 5
	Indeks peningkatan kompetensi peserta pasca pendidikan dan pelatihan	3,8 dalam skala 5
Meningkatnya efektivitas organisasi, tata laksana, dan akuntabilitas kinerja	Persentase hasil evaluasi pelaksanaan proses bisnis di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dengan kategori Baik	90%
	Persentase hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada seluruh satuan organisasi/satuan kerja/unit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dengan kategori AA (Sangat Memuaskan)	80%

Program

1. Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara

Anggaran

Rp1.470.677.000,-

Rp14.903.800.000,-

Menteri Sekretaris Negara,



Pratikno

Jakarta, Januari 2019

Deputi Bidang Administrasi Aparatur,



Cecep Sutiawan



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Harly Agung Prabowo
jabatan : Kepala Biro Administrasi Pejabat Negara

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama : Cecep Sutiawan
jabatan : Deputi Bidang Administrasi Aparatur

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Cecep Sutiawan

Jakarta, Januari 2019
Pihak Pertama,

Harly Agung Prabowo

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BIRO ADMINISTRASI PEJABAT NEGARA**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya kualitas penanganan administrasi pejabat negara dan pejabat lainnya	Persentase rancangan Keputusan Presiden mengenai pengangkatan, pemberhentian dan pensiun pejabat negara, dan pejabat lainnya yang diselesaikan sesuai standar	100%
		Persentase rancangan Surat Presiden, Surat Mensesneg dan Surat Deputi Administrasi Aparatur terkait pejabat negara, dan pejabat lainnya yang diselesaikan sesuai standar	100%
		Persentase salinan dan petikan Keputusan Presiden mengenai pengangkatan, pemberhentian dan pensiun pejabat negara, dan pejabat lainnya yang diselesaikan sesuai standar	100%
		Persentase naskah pelantikan pejabat negara dan pejabat lainnya yang diselesaikan sesuai standar	100%
		Persentase produk administrasi pejabat negara dan pejabat lainnya yang ditatausahakan, dikelola datanya serta diarsipkan dan didokumentasikan sesuai standar	100%

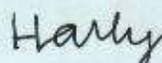
Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Pejabat Negara serta Administrasi Lainnya yang berkaitan dengan Pejabat Negara: Rp1.262.918.000,-

Deputi Bidang Administrasi
Aparatur



Cecep Sutiawan.

Jakarta, Januari 2019
Kepala Biro Administrasi Pejabat
Negara



Harly Agung Prabowo



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mudari
Jabatan : Kepala Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Cecep Sutiawan
Jabatan : Deputi Bidang Administrasi Aparatur

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Cecep Sutiawan

Jakarta, 2 Januari 2019

Pihak Pertama,

Mudari

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEJABAT PEMERINTAHAN

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas administrasi pejabat pemerintahan dan pejabat lainnya	Persentase Rancangan Keputusan Presiden tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat pemerintahan dan pejabat lainnya yang diselesaikan sesuai dengan standar	100%
		Persentase Rancangan Keputusan Presiden tentang kenaikan pangkat, pemberhentian, dan pensiun Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional Jenjang Utama yang diselesaikan sesuai standar	100%
		Persentase Petikan dan Salinan Keputusan Presiden tentang pejabat pemerintahan dan pejabat lainnya, kenaikan pangkat, pemberhentian, dan pensiun Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional Jenjang Utama yang diselesaikan sesuai standar	100%

	Persentase penyiapan bahan analisis dan penyusunan pendapat terkait pejabat pemerintahan dan pejabat lainnya, kenaikan pangkat, pemberhentian, dan pensiun Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional Jenjang Utama yang ditindaklanjuti	100%
	Persentase Pengadministrasian Keputusan Presiden tentang pejabat pemerintahan dan pejabat lainnya, serta kenaikan pangkat, pemberhentian, dan pensiun Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional Jenjang Utama yang diselesaikan sesuai standar	100%

Kegiatan

1. Penyelenggaraan pelayanan administrasi pejabat pemerintahan serta administrasi lainnya yang berkaitan dengan pejabat pemerintahan

Anggaran

Rp207.759.000

Deputi Bidang Administrasi
Aparatur



Cecep Sutiawan

Jakarta, 2 Januari 2019
Kepala Biro Administrasi Pejabat
Pemerintahan



Mudari



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Andri Kurniawan K.P.
jabatan : Kepala Biro Sumber Daya Manusia

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama : Cecep Sutiawan
jabatan : Deputi Bidang Administrasi Aparatur

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2019

Pihak Kedua,

Cecep Sutiawan

Pihak Pertama,

Andri Kurniawan K.P.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia	1. Persentase penyusunan e-formasi ASN Kementerian Sekretariat Negara yang dilaksanakan sesuai ketentuan	100%
	2. Persentase pengadaan calon ASN Kementerian Sekretariat Negara yang dilaksanakan sesuai ketentuan	100%
	3. Persentase pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	100%
	4. Persentase SK kenaikan pangkat PNS yang diselesaikan tepat waktu	100%
	5. Persentase SK pensiun PNS yang diselesaikan tepat waktu	100%
	6. Persentase pejabat/pegawai yang melaporkan LHKPN dan LHKASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%
	7. Persentase pejabat/pegawai yang telah memiliki profil kompetensi	91%
	8. Indeks kepuasan layanan administrasi kepegawaian di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	3,5 dalam skala 5
	9. Persentase penyelesaian kasus pelanggaran disiplin pegawai di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	100%
	10. Jumlah dokumen rencana pengembangan sumber daya manusia	4 Dokumen

Kegiatan

Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Anggaran

Rp3.733.611.000,00

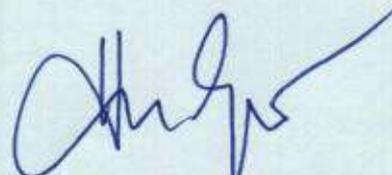
Deputi Bidang Administrasi Aparatur,

Jakarta, 2 Januari 2019

Kepala Biro Sumber Daya Manusia,



Cecep Sutiawan



Andri Kurniawan K.P.



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Agussalim
jabatan : Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama : Cecep Sutiawan
jabatan : Deputi Bidang Administrasi Aparatur

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,

Cecep Sutiawan

Pihak Pertama,

Agussalim

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BIRO ORGANISASI, TATA LAKSANA, DAN AKUNTABILITAS KINERJA

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya efektivitas organisasi dan tata laksana serta akuntabilitas kinerja	Jumlah rancangan Peraturan/Keputusan Menteri Sekretaris Negara/telaahan staf di bidang organisasi yang disetujui Deputi Bidang Administrasi Aparatur	3 Dokumen
	Jumlah dokumen analisis jabatan/analisis beban kerja/evaluasi jabatan/standar kompetensi jabatan yang disetujui Deputi Bidang Administrasi Aparatur	1 Dokumen
	Persentase hasil evaluasi pelaksanaan proses bisnis di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dengan kategori Baik	90%
	Jumlah rancangan Peraturan Menteri Sekretaris Negara/dokumen di bidang tata laksana yang disetujui Deputi Bidang Administrasi Aparatur	3 Dokumen
	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan di bidang tata laksana di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang disusun	3 Dokumen
	Persentase hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada seluruh satuan organisasi/satuan kerja/unit kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dengan	80%
	Jumlah laporan pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, dan Sekretariat Kantor Staf Kepresidenan yang disusun	4 Dokumen
	Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi (RA) Kementerian Sekretariat Negara serta satuan organisasi/unit kerja/satuan kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, dan Sekretariat Kantor Staf Kepresidenan yang disusun	2 Dokumen
	Jumlah dokumen Laporan Kinerja (LKj) Kementerian Sekretariat Negara serta laporan hasil koordinasi penyusunan LKj satuan organisasi/unit kerja/satuan kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, dan Sekretariat Kantor Staf Kepresidenan yang disusun	3 Dokumen
	Jumlah dokumen Laporan Kinerja (LKj) Deputi Bidang Administrasi Aparatur yang disusun	1 Dokumen
	Jumlah dokumen rencana kerja dan laporan biro	2 Dokumen

Kegiatan

Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, serta Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Sekretariat Negara

Anggaran

Rp. 998.196.000,-

Jakarta, Januari 2019

Deputi Bidang Administrasi Aparatur,



Cecep Sutiawan

Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana,
dan Akuntabilitas Kinerja,



Agussalim



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Samidi Fahrudin
jabatan : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama : Cecep Sutiawan
jabatan : Deputi Bidang Administrasi Aparatur

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Cecep Sutiawan

Jakarta, Januari 2019
Pihak Pertama,

Samidi Fahrudin

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan SDM yang profesional	1. Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan.	4,2 dari skala 5
		2. Indeks peningkatan kompetensi peserta pascapelatihan.	3,8 dari skala 5
		3. Persentase peserta pelatihan yang memperoleh sertifikat.	92%
		4. Jumlah dokumen penetapan rencana program pengembangan kompetensi SDM.	1 dokumen
		5. Jumlah penerima beasiswa pendidikan dengan gelar dalam dan luar negeri.	15 orang
		6. Jumlah program pengembangan kompetensi SDM terpadu berbasis teknologi informasi dan komunikasi.	5 program
		7. Jumlah laporan dukungan kegiatan penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi SDM.	1 laporan

Kegiatan

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan SDM Kementerian Sekretariat Negara

Anggaran

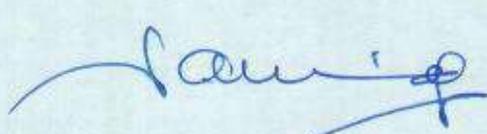
Rp10.171.993.000,-

Jakarta, Januari 2019

Deputi Bidang Administrasi Aparatur,

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan,


Cecep Sutiawan


Samidi Fahrudin

INSPEKTORAT



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imam Suharjo
Jabatan : Inspektur Kementerian Sekretariat Negara

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : Pratikno
Jabatan : Menteri Sekretaris Negara

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua,

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,

Pratikno

Pihak Pertama,

Imam Suharjo

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
INSPEKTORAT KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	1. Persentase rekomendasi hasil temuan audit yang ditindaklanjuti	100%
		2. Persentase satuan kerja yang melaksanakan anggaran dan penyusunan laporan keuangan sesuai ketentuan	100%
		3. Tingkat Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Sekretariat Negara	Level 3
		4. Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara	Level 3

Kegiatan/Anggaran

Penyelenggaraan Pengawasan Kementerian Sekretariat Negara Rp.917.434.000,-.

Jakarta, Januari 2019

Menteri Sekretaris Negara



Pratikno

Inspektur Kementerian
Sekretariat Negara,



Imam Suharjo

**SEKRETARIAT DEWAN
PERTIMBANGAN PRESIDEN**



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

Jalan Veteran III No 2, Jakarta 10110, Telepon (021) 3444801, Faksimile (021) 3866850

Situs: www.wantimpres.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

nama : Agus Widodo
jabatan : Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden

selanjutnya disebut Pihak Pertama

nama : Sri Adiningsih
jabatan : Ketua Dewan Pertimbangan Presiden

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,

Sri Adiningsih

Pihak Pertama,

Agus Widodo

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden	Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden	95%

Program

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara

Anggaran

Rp 36.396.300.000,00

Ketua Dewan Pertimbangan Presiden



Sri Adiningsih

Jakarta, Januari 2019

Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden,



Agus Widodo



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

Jalan Veteran III No 2, Jakarta 10110, Telepon (021) 3444801, Faksimile (021) 3866850

Situs: www.wantimpres.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

nama : Agus Widodo
jabatan : Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden

selanjutnya disebut Pihak Pertama

nama : Sri Adiningsih
jabatan : Ketua Dewan Pertimbangan Presiden

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,

Sri Adiningsih

Pihak Pertama,

Agus Widodo

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

No (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden	Tingkat kepuasan Dewan Pertimbangan Presiden atas dukungan teknis dan administrasi yang diberikan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden dalam rangka penyusunan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden	95%

Program

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara

Anggaran

Rp 36.396.300.000,00

Ketua Dewan Pertimbangan Presiden



Sri Adningsih

Jakarta, Januari 2019

Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden,



Agus Widodo



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

Jalan Veteran III No 2, Jakarta 10110, Telepon (021) 3444801, Faksimile (021) 3866850

Situs: www.wantimpres.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

nama : M. Arfan Sahib S.K.
jabatan : Kepala Biro Data dan Informasi, Sekretariat Dewan
Pertimbangan Presiden

selanjutnya disebut pihak pertama

nama : Agus Widodo
jabatan : Sekretaris Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Jakarta, Januari 2019
Pihak Pertama,


AGUS WIDODO


M. ARFAN SAHIB S.K.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BIRO DATA DAN INFORMASI

No (1)	Sasaran Program/Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Tersedianya data dan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Pertimbangan Presiden dalam melaksanakan tugas pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Presiden	1 Persentase pengelolaan data dan penyajian informasi yang dibutuhkan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden 2 Jumlah rancangan Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Pertimbangan Presiden yang disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Presiden tepat waktu 3 Jumlah dokumen rencana kerja dan laporan tahunan Biro Data dan Informasi yang disusun	100% 2 dokumen 2 dokumen

Kegiatan
Kegiatan Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi
Rp7.866.974.000

Anggaran
Rp7.866.974.000

Jakarta, Januari 2019

Sekretaris Sekretariat Dewan Pertimbangan
Presiden,

Kepala Biro Data dan Informasi,


AGUS WIDODO


M. ARFAN SAHIB S.K.



KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

Jalan Veteran III No 2, Jakarta 10110. Telepon (021) 3444801, Faksimile (021) 3866850

Situs: www.wantimpres.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

nama : A.M. Adiyarto Sumardjono
jabatan : Kepala Biro Umum,
Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden

selanjutnya disebut Pihak Pertama,

nama : Agus Widodo
jabatan : Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Kedua,

Agus Widodo

Pihak Pertama,

A.M. Adiyarto Sumardjono

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BIRO UMUM**

No (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)	
1	Terwujudnya dukungan pelayanan keprotokolan dan persidangan serta pelayanan administrasi umum di lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden.	1	Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan keprotokolan	100%
		2	Persentase kegiatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang mendapatkan pelayanan Persidangan	100%
		3	Jumlah dokumen ketatausahaan yang diselesaikan sesuai Standar Pelayanan	2 dokumen
		4	Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran yang diselesaikan sesuai ketentuan	10 dokumen
		5	Jumlah dokumen kepegawaian yang diselesaikan sesuai standar	1 dokumen
		6	Jumlah dokumen penyelenggaraan urusan keuangan yang diselesaikan sesuai ketentuan	9 dokumen
		7	Jumlah dokumen administrasi sarana dan prasarana sesuai ketentuan	1 dokumen
		8	Persentase penyediaan sarana dan prasarana sesuai ketentuan	100%
		9	Persentase penerapan e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa	100%
		10	Jumlah dokumen rencana kerja dan laporan tahunan Biro Umum yang disusun	2 dokumen

Kegiatan

Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Dewan Pertimbangan Presiden

Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden,

Anggaran

Rp 28.529.326.000,00

Jakarta, Januari 2019

Kepala Biro Umum,

A.M. Adiyarto Sumardjono



Agus Widodo



SEKRETARIAT KANTOR STAF PRESIDEN



KANTOR STAF PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Jl. Veteran No. 16 Jakarta 10110 Indonesia, Telp : +62-21-2354-5001, Fax : +62-21-3450-009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Widodo
Jabatan : Kepala Sekretariat Kantor Staf Presiden
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Moeldoko
Jabatan : Kepala Staf Kepresidenan
selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Jakarta, Januari 2019
Pihak Pertama,

Moeldoko

Agus Widodo



KANTOR STAF PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Jl. Veteran No. 16 Jakarta 10110 Indonesia, Telp : +62-21-2354-5001, Fax : +62-21-3450-009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 KEPALA SEKRETARIAT KANTOR STAF PRESIDEN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Dukungan Teknis dan Administrasi Kepada KSP	1. Persentase ketersediaan data dan informasi yang dibutuhkan pimpinan Kantor Staf Presiden	100%
		2. Persentase dukungan pelayanan ketersediaan <i>up time</i> sistem dan aplikasi kritikal bagi Kantor Staf Presiden	100%
		3. Persentase dukungan penanganan insiden keamanan sistem informasi yang tersolusikan	100%
		4. Jumlah dokumen rencana, program dan anggaran yang diselesaikan sesuai ketentuan	11 Dokumen
		5. Jumlah dokumen urusan keuangan yang diselesaikan sesuai ketentuan	17 Dokumen
		6. Jumlah dokumen evaluasi dan penyusunan pelaporan kinerja serta ketatalaksanaan yang diselesaikan sesuai ketentuan	7 Dokumen
		7. Jumlah dokumen pelayanan urusan kepegawaian yang diselesaikan sesuai ketentuan	1 laporan
		8. Jumlah laporan urusan ketatausahaan, pengelolaan arsip dan dokumentasi serta keprotokolan yang diselesaikan sesuai ketentuan	1 Laporan
		9. Jumlah laporan urusan kerumahtanggaan yang diselesaikan sesuai ketentuan	1 Laporan
		10. Jumlah laporan pengelolaan BMN/Kekayaan Negara serta layanan pengadaan barang/jasa yang diselesaikan sesuai ketentuan	1 Laporan

Kegiatan:

Pemberian dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis

Anggaran:

Rp. 35.055.710.000,-

Kepala Staf Kepresidenan

Moeldoko

Jakarta, Januari 2019
Kepala Sekretariat
Kantor Staf Presiden

Agus Widodo